



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2016

Pemerintah Daerah Kota Bima
Tahun 2017

Kata Pengantar

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengutamakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), peningkatan Pelayanan Publik dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP), Pemerintah Kota Bima terus berupaya melakukan pembenahan, perubahan dan penyempurnaan dalam segala bidang dan sektor untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima.



Dengan berakhirnya tahun anggaran 2016, sebagaimana bentuk pertanggungjawaban Walikota dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah Pemerintah Kota Bima, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bima Tahun 2016 dengan menggunakan alat ukur yang terdapat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2016.

Laporan kinerja ini menyajikan berbagai hasil capaian kinerja, prestasi dan keberhasilan Pemerintah Kota Bima pada tahun 2016 dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pada kesempatan ini disampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Bima yang telah bekerja keras bersama mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2016 dengan kinerja yang profesional dan optimal, maka Visi Kota Bima dapat tercapai.

WALIKOTA BIMA,



M. QURAIH H. ABIDIN

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I Pendahuluan	1
BAB II Perencanaan Kinerja	14
BAB III Akuntabilitas Kinerja.....	23
BAB IV Penutup	92

Daftar Tabel

Tabel 1. Luas Wilayah Kota Bima Dirinci Menurut Kecamatan	7
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kecamatan Tahun 2014.....	11
Tabel 3. Statistik Ketenagakerjaan Kota Bima Tahun 2011-2014.....	11
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2015	20
Tabel 5. Skala Ordinal sebagai Perangkat Penilaian.....	23
Tabel 6. Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2015.....	24
Tabel 7. Pencapaian Kinerja Masing-Masing Sasaran Strategis Tahun 2015.....	24
Tabel 8. Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2015.....	25
Tabel 9. Pencapaian Masing-Masing Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015	25
Tabel 10. Capaian Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Tahun 2014-2015.....	28
Tabel 11. Capaian Kinerja Jumlah Konflik SARA yang terjadi di Kota Bima.....	29
Tabel 12. Capaian Kinerja Persentase Sanggar seni yang Aktif.....	31
Tabel 13. Jumlah Sekolah yang Menerapkan Pembelajaran Berbasis TIK Tahun 2015..	37
Tabel 14. Capaian Kinerja Persentase Sekolah yang Menerapkan Pembelajaran Berbasis TIK.....	37
Tabel 15. Capaian Kinerja Rata-Rata Nilai UN Tahun 2015.....	39
Tabel 16. Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013-2014.....	41
Tabel 17. Capaian Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2011-2014.....	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 18. Statistik Ketenagakerjaan Kota Bima Tahun 2011-2014.....	43
Tabel 19. Capaian Angka Harapan Hidup Kota Bima Tahun 2014.....	45
Tabel 20. Capaian Kinerja Cakupan Penanganan Kasus Balita Gizi Buruk Tahun 2015 ..	46
Tabel 21. Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin Penerima Kartu Jamkes JUJUR SEHATI Tahun 2015	47
Tabel 22. Laporan Kunjungan dan Rujukan Pasien Penerima Manfaat Kartu JUJUR SEHATI Tahun 2015	48
Tabel 23. Capaian Kinerja Rumah Tangga Berakses Air Bersih Tahun 2015	49
Tabel 24. Capaian Kinerja Indikator Rumah Layak Huni Tahun 2015.....	50
Tabel 25. Rumah Layak Huni yang Dibangun Tahun 2015.....	50
Tabel 26. Capaian Kinerja Persentase Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi Tahun 2015.....	52
Tabel 27. Capaian Kinerja Lama Proses Perijinan di Kota Bima	59
Tabel 28. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Tahun 2010–2014	62

Tabel 29. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima pada masing-masing sektor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2011-2014..	63
Tabel 30. PDRB Per Kapita Kota Bima Tahun 2011- 2014.....	66
Tabel 31. Capaian Kinerja Produksi Tanaman Pangan Kota Bima Tahun 2015.....	68
Tabel 32. Capaian Produksi Tanaman Pangan Kota Bima Tahun 2011-2015.....	69
Tabel 33. Perbandingan capaian kinerja produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2015 dengan Target RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018.....	70
Tabel 34. Capaian Kinerja Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik.....	72
Tabel 35. Capaian Kinerja Persentase Luas Pemukiman Kumuh Tahun 2015	74
Tabel 36. Capaian Kinerja Persentase Luas Kawasan Tepian Air yang Tertata Tahun 2015.....	76
Tabel 37. Capaian Kinerja Indeks Kriminalitas Kota Bima Tahun 2015	79
Tabel 38. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bima Tahun 2015.....	82
Tabel 39. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima Tahun 2015.....	89

Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Administrasi Kota Bima	7
Gambar 2. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima Tahun 2011-2014.....	12
Gambar 3. Bagan Operasionalisasi Misi I menjadi Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja	16
Gambar 4. Bagan Operasionalisasi Misi II menjadi Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja	17
Gambar 5. Bagan Operasionalisasi Misi III menjadi Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja	18
Gambar 6. Bagan Operasionalisasi Misi IV menjadi Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja	19
Gambar 7. Grafik Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bima Tahun 2012-2014.....	35
Gambar 8. Grafik Perkembangan IPM Kota Bima Tahun 2010-2014	40
Gambar 9. Grafik Angka Kemiskinan Kota Bima Tahun 2010-2014	42
Gambar 10. Grafik Capaian Kinerja Penurunan Angka Kemiskinan Tahun 2011-2014	Error! Bookmark not defined.
Gambar 11. Grafik Persentase Tingkat Pengangguran di Kota Bima Tahun 2011-2014	44
Gambar 12. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bima Tahun 2012-2014	45
Gambar 13. Grafik Perbandingan Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2014-2015	46
Gambar 14. Grafik Perkembangan Rumah Tangga berakses Air Bersih Tahun 2014-2015.....	49
Gambar 15. Grafik jumlah kasus kriminalitas di Kota Bima Tahun 2014-2015.....	79

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan

A. Penjelasan Umum Organisasi

Pemerintah Kota Bima dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pemerintahan Kota Bima menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan serta program dan kegiatan pemerintah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah yang merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah, yang dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penataan organisasi perangkat daerah ini didasarkan pada kerangka regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bima merupakan urusan yang berskala kota meliputi : perencanaan dan pengendalian pembangunan, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana umum, penanganan bidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan, penanggulangan masalah sosial, pelayanan bidang ketenaga kerjaan, fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, pengendalian lingkungan hidup, pelayanan pertanahan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil, pelayanan administrasi umum pemerintahan, pelayanan administrasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya dan urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Adapun kewenangan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Penyelenggara Pemerintah Kota Bima dipimpin oleh seorang Walikota yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota. Penyelenggaraan Pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas : asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas efektifitas. Dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah menggunakan asas ekonomi dan tugas pembantuan.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, memungut pajak daerah dan retribusi daerah, mendapatkan hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah, mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengembangkan kehidupan demokrasi, mewujudkan keadilan dan pemerataan, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, mengembangkan sistem jaminan sosial, menyusun perencanaan tata ruang daerah, mengembangkan sumber daya produktif di daerah, melestarikan lingkungan hidup, mengelola administrasi kependudukan, melestarikan nilai sosial budaya, membentuk dan menerapkan peraturan Perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya, kewajiban lain yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

Tugas dan wewenang Walikota sebagai Kepala Daerah, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kewajiban yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan Peraturan Daerah, menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Walikota sebagai Kepala Daerah adalah memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan kehidupan demokrasi, mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan, menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, memajukan dan mengembangkan daya saing daerah, melaksanakan prinsip taat pemerintahan yang bersih dan baik, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Organisasi daerah pada Pemerintah Kota Bima (yang didasarkan kerangka regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007), didasarkan pada beberapa Peraturan Daerah, yaitu :

1. Peraturan Daerah Kota Bima nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Bima. terdiri dari 5 kecamatan dan 38 kelurahan, yaitu:
 - a. **Kecamatan Rasanae Barat**
 1. Kelurahan Tanjung
 2. Kelurahan Paruga
 3. Kelurahan SaraE
 4. Kelurahan NaE
 5. Kelurahan Pane
 6. Kelurahan Dara
 - b. **Kecamatan Mpunda**
 1. Kelurahan Sambinae
 2. Kelurahan Panggi
 3. Kelurahan Monggonao
 4. Kelurahan Manggemaci
 5. Kelurahan Penatoi
 6. Kelurahan Lewirato
 7. Kelurahan Sadia
 8. Kelurahan Mande

9. Kelurahan Santi
10. Kelurahan Matakando

c. Kecamatan Raba

1. Kelurahan Penaraga
2. Kelurahan Penanae
3. Kelurahan Rite
4. Kelurahan Rabangodu Utara
5. Kelurahan Rabangodu Selatan
6. Kelurahan Rabadompu Timur
7. Kelurahan Rabadompu Barat
8. Kelurahan Rontu
9. Kelurahan Ntobo
10. Kelurahan Kendo
11. Kelurahan Nitu

d. Kecamatan Asakota

1. Kelurahan Melayu
2. Kelurahan Jatiwangi
3. Kelurahan Jatibaru
4. Kelurahan Kolo

e. Kecamatan Rasanae Timur

1. Kelurahan Kumbe
2. Kelurahan Lampe
3. Kelurahan Oi Fo'o
4. Kelurahan Kodo
5. Kelurahan Dodu
6. Kelurahan Lelamase
7. Kelurahan Nungga

2. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Bima serta Staf Ahli Walikota Bima. Yaitu :
 - a. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - 1) Sekretaris Daerah

- 2) Asisten Pemerintahan dan Kesra, membidangi :
 - Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
 - Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
 - Bagian Hukum
 - 3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membidangi :
 - Bagian Administrasi Pembangunan
 - Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - 4) Asisten Administrasi Umum, membidangi :
 - Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur
 - Bagian Humas dan Protokol
 - Bagian Umum dan Perlengkapan
 - b. Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
 - 1) Sekretaris DPRD
 - 2) Bagian Hukum dan Persidangan
 - 3) Bagian Keuangan
 - 4) Bagian Umum
 - 5) Bagian Humas dan Protokol
3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima, Kota Bima terdiri dari 14 (empat belas) Dinas Daerah. Yaitu:
- a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - d. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - f. Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi
 - g. Dinas Tata Kota dan Perumahan
 - h. Dinas Kebersihan, Pertamanan, dan Pemakaman
 - i. Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Peternakan
 - j. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
 - k. Dinas Kelautan dan Perikanan
 - l. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Peraturan Daerahgangan

- m. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - n. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Bima. Lembaga Teknis Daerah pada jajaran Pemerintah Kota Bima, terdiri dari 10 (sepuluh) Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari .yaitu:
- 1. Inspektorat
 - 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan
 - 4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
 - 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 6. Badan Lingkungan Hidup Ketahanan Pangan dan Penyuluhan
 - 7. Badan Kepegawaian Daerah
 - 8. Kantor Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
 - 9. Kantor Arsip dan Perpustakaan
 - 10. Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu
5. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai Bagian dari Perangkat Daerah, yaitu pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

B. Aspek Strategis

Kota Bima merupakan salah satu kota yang ada di Propinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis Kota Bima terletak di Pulau Sumbawa bagian timur pada posisi 118°41'00" Bujur Timur – 118°48'00" Bujur Timur dan 8°30'00" Lintang Selatan – 8°20'00" Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

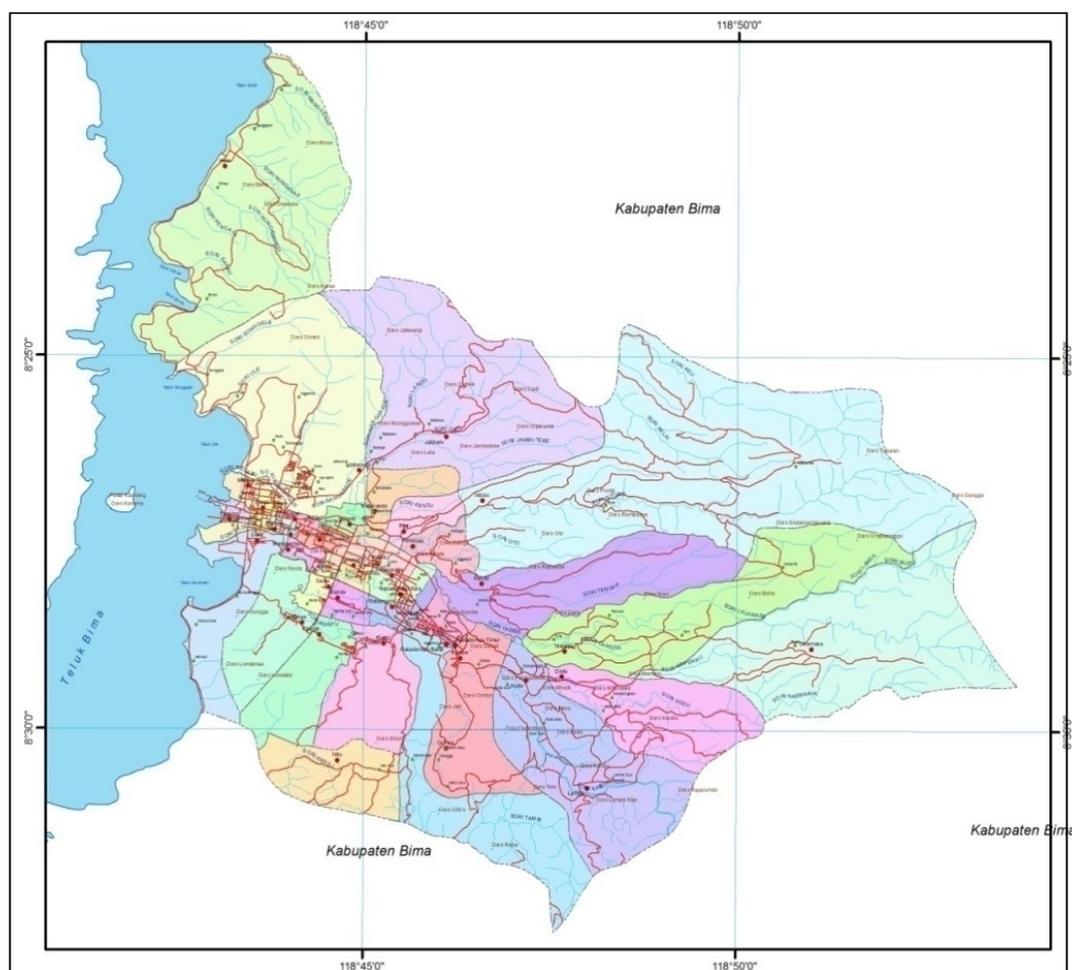
- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Teluk Bima

Luas Wilayah Kota Bima 222,25 km², yang mencakup 5 (lima) Kecamatan dan 38 (tiga puluh delapan) Kelurahan. Adapun Wilayah Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Asakota yaitu 69,03 km² dan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Rasanae Barat yaitu 10,14 km².

Tabel 1. Luas Wilayah Kota Bima Dirinci Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Kelurahan
1.	Rasanae Barat	10,14	6
2.	Mpunda	15,28	10
3.	Rasanae Timur	64,07	7
4.	Raba	63,73	11
5.	Asakota	69,03	4
Jumlah		222,25	38

Sumber: BPS Kota Bima (*Kota Bima Dalam Angka, 2016*)



Gambar 1. Peta Administrasi Kota Bima

Penggunaan lahan di Kota Bima sampai tahun 2012 meliputi kawasan pertanian (10,13%), kawasan terbangun (5,89%), perkebunan dan tegalan (18,30%), ladang (5,82%), dan kawasan hutan (54,68%). Dalam perkembangannya selama kurun waktu 2008–2012 terjadi konversi lahan yang cukup besar mencapai sekitar ±2,1 Ha/tahun untuk fungsi perumahan, perkantoran, pendidikan, serta untuk pertokoan. Hal ini terjadi sebagai akibat pertumbuhan penduduk dan semakin pesatnya dinamika pertumbuhan kota yang berimplikasi pada penyesuaian terhadap kebutuhan lahan untuk pengembangannya.

Dalam RTRW Nasional, Kota Bima ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi sebagai pintu gerbang dan simpul utama transportasi Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima. Sementara, dalam RTRW Provinsi NTB, Kota Bima ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Teluk Bima di bidang pertumbuhan ekonomi khususnya dengan fokus pengembangan sektor Pariwisata, Industri, dan Perikanan. Keberadaan Kota Bima sebagai PKN dan KSP memiliki potensi yang sangat strategis dalam pengembangan wilayah Kota.

Secara kewilayahan Kota Bima dibagi menjadi beberapa pusat pelayanan dalam kerangka rencana struktur ruang dengan maksud untuk meningkatkan fungsi dan peran pusat-pusat pelayanan serta meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah Kota. Adapun pusat-pusat pelayanan yang dimaksud sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut :

1) Pusat pelayanan kota meliputi :

Pusat pelayanan Kota Bima di Kecamatan Rasanae Barat, sebagian Kecamatan Asakota dan sebagian Kecamatan Mpunda yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala nasional serta pariwisata skala regional.

- a) Sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Mpunda yang meliputi Kelurahan Penatoi, Kelurahan Sadia dan Kelurahan Sambinae dan berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan, administrasi umum, dan pendidikan skala regional;
- b) Sub pusat pelayanan kota di Kecamatan Raba yang meliputi Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan Rabadompu Timur, dan Kelurahan Rabadompu

Barat dan berfungsi sebagai pusat kegiatan industri kecil dan kerajinan serta pusat pelayanan kesehatan skala regional; dan

- c) Sub pusat pelayanan kota di Kelurahan Oi Fo'o dan Kelurahan Nitu Kecamatan Rasanae Timur yang berfungsi sebagai pusat peruntukan industri.

2) Pusat lingkungan meliputi :

- a) Kelurahan Jatiwangi yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal, dan pusat pelayanan kesehatan skala lokal;
- b) Kelurahan Mande yang berfungsi sebagai pusat pendidikan dan pusat Peraturan Daerah jasa skala regional;
- c) Kelurahan Manggemaci yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal serta sebagai pusat pelayanan umum;
- d) Kelurahan Santi yang berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal;
- e) Kelurahan Kodo dan sekitarnya yang berfungsi sebagai pusat pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, pusat Peraturan Daerah jasa skala lokal, pusat pelayanan kesehatan skala lokal, dan simpul transportasi skala lokal;
- f) Kelurahan Kolo yang berfungsi sebagai pusat pariwisata bahari, pusat perdagangan dan jasa skala lokal, dan pusat pelayanan kesehatan skala lokal.

Pusat - pusat pelayanan tersebut di atas dikembangkan sebagai pusat aktivitas skala kota dan regional, karena memiliki daya tarik yang tinggi terhadap perkembangan dan pertumbuhan kota. Disamping penetapan pusat-pusat pelayanan, dalam RTRW Kota Bima juga ditetapkan beberapa kawasan strategis. Kawasan strategis ini dikembangkan dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berkelanjutan. Kawasan strategis juga menjadi wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh signifikan dalam lingkup kota maupun regional di bidang ekonomi, sosial-budaya, dan/atau lingkungan.

Fungsi kawasan strategis kota dalam pembangunan berbasis spasial adalah :

- 1) Mendorong keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan dalam mendukung penataan ruang wilayah kota secara berkelanjutan;
- 2) Alokasi ruang untuk berbagai kegiatan pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam wilayah kota yang dinilai mempunyai pengaruh sangat penting terhadap wilayah kota bersangkutan;
- 3) Sebagai pertimbangan dalam penyusunan indikasi program utama RTRW kota dan penyusunan rencana rinci tata ruang kota.

Kawasan Strategis Kota meliputi Kawasan Strategis berdasarkan Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, Kepentingan Sosial Budaya, dan Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup. Adapun wilayah kawasan strategis dimaksud adalah meliputi :

- 1) Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi :
 - a. Kawasan Pantai Amahami – Ni'u di Kelurahan Dar, dan Pantai Kolo di Kelurahan Kolo dengan sektor unggulan pariwisata.
 - b. Kawasan Perkotaan yang meliputi di Kelurahan Sarae, kelurahan Tanjung, Kelurahan Dara dan Kelurahan Paruga dengan sektor unggulan Peraturan Daerahgangan dan jasa.
 - c. Kawasan Kelurahan Oi Fo'o, Kelurahan Nitu, Kelurahan Rontu, Kelurahan Panggi dengan sektor unggulan industri marmer.
- 2) Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan sosial budaya meliputi : Kawasan Istana Kesultanan Bima dan sekitarnya meliputi Kelurahan Paruga, Kelurahan Sarae, Kelurahan Melayu dan Kelurahan Dara.
- 3) Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup adalah Kawasan Hutan Lampe-Maria di Kelurahan Lampe dan Kawasan Nanga Nae Kapenta di Kelurahan Jatibaru dan Kelurahan Kolo yang berfungsi konservasi.

Dari aspek demografi, penduduk Kota Bima tahun 2015 tercatat sebanyak 159.736 jiwa, yang terdiri dari 78.394 orang penduduk laki-laki dan 81.342 orang penduduk perempuan. Sex ratio Kota Bima adalah 96,4 yang menggambarkan bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat 96 orang penduduk laki-laki.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kecamatan Tahun 2015

No.	Kecamatan	Laki- Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
1.	Rasanae Barat	17.114	17.757	34.871
2.	Mpunda	17.868	18.541	36.409
3.	Rasanae Timur	8.909	9.246	18.155
4.	Raba	19.160	19.878	39.038
5.	Asakota	15.343	15.920	31.263
Jumlah		78.394	81.342	159.736

Sumber: Kota Bima Dalam Angka, 2016

Berdasarkan distribusi penduduk tiap kecamatan, maka Kecamatan Raba memiliki jumlah penduduk terbesar, yaitu 39.038 jiwa pada tahun 2015. Adapun distribusi terendah terdapat pada Kecamatan Rasanae Timur yaitu sebanyak 18.155 jiwa.

Kepadatan penduduk Kota Bima dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, dan tahun 2015 tercatat sebesar 719 jiwa/km². Kecamatan Rasanae Barat merupakan kecamatan yang paling padat yakni 3.439 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Rasanae Timur merupakan kecamatan yang paling jarang penduduknya yakni 283 jiwa untuk setiap satu km².

Salah satu aspek strategis dalam hal demografi adalah bahwa Kota Bima perlu mempersiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi tantangan bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2020-2030, dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan mencapai angka hingga 70%.

Dari aspek ketenagakerjaan, gambaran karakteristik ketenagakerjaan Kota Bima pada kurun tiga tahun terakhir dapat dilihat dari hasil olah data Sakernas sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3. Statistik Ketenagakerjaan Kota Bima Tahun 2013-2015

Uraian	2013	2014	2015
Tingkat Pengangguran (%)	9,13	8,69	7,80

Sumber : Hasil Olah Sakernas Agustus 2015 (BPS, 2016)

Pasar tenaga kerja di Indonesia terus mengalami perkembangan. Hal ini dapat ditunjukkan dari peningkatan partisipasi angkatan kerja dan penurunan angka pengangguran terbuka. Angka pengangguran terbuka di Kota Bima cenderung menurun

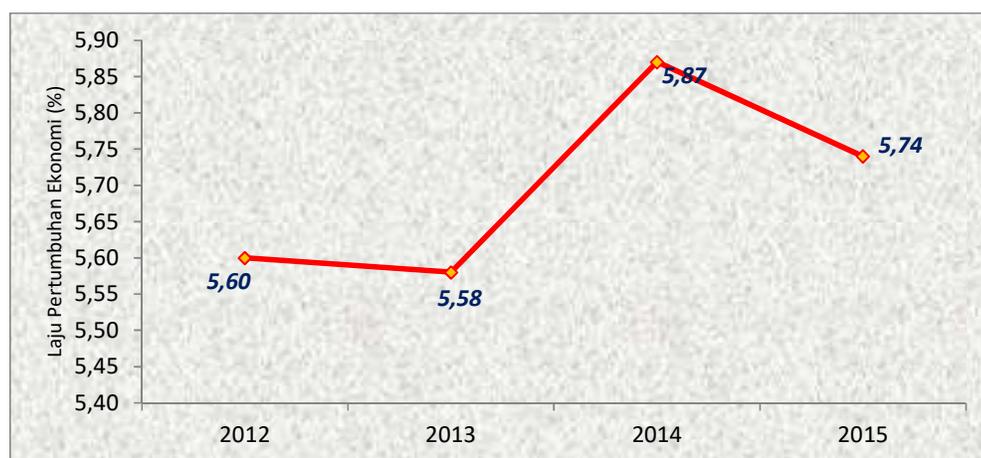
selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2015, angka pengangguran mencapai 7,80 persen, menurun dibandingkan dengan tahun 2014 yaitu sebesar 8,69 persen. Meskipun demikian, pengangguran terbuka masih menjadi tantangan, terutama bagi kalangan muda usia 20-24 tahun.

Untuk melihat kondisi perekonomian Kota Bima, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk melihat gambaran produktivitas perekonomian di suatu wilayah yang salah satunya digambarkan melalui jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi yang beroperasi pada periode tertentu.

PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku tahun 2015 telah mencapai 2.993,33 milyar rupiah. Angka tersebut meningkat setiap tahun dari 2.373,69 Milyar rupiah tahun 2013, menjadi 2.993,33 Milyar rupiah pada tahun 2015. Artinya, telah terjadi peningkatan sebesar 619,64 Milyar rupiah dalam kurun waktu 2013 - 2015.

Hal yang sama juga terjadi pada angka PDRB atas dasar harga konstan, yakni dari 2.177,54 milyar rupiah pada tahun 2013 menjadi 2.437,61 milyar rupiah pada tahun 2015.

Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kota Bima tercatat sebesar 5,74 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Bima tahun 2012-2015 berturut-turut 5,6 persen, 5,58 persen, 5,87 persen dan 5,74 persen.



Gambar 2. Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bima Tahun 2012-2015

C. Permasalahan yang Dihadapi

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bima dalam proses perencanaan daerah dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, antara lain :

1. Tingkat partisipasi Instansi Pemerintah Propinsi, Lembaga Kemasyarakatan, Pihak Swasta, Serta Tokoh Masyarakat dalam memberikan informasi yang lengkap, jelas, cepat, tepat dan akurat masih belum maksimal. Hal ini mengakibatkan pengambilan kebijakan, penetapan program, pelaksanaan kegiatan masih kurang tepat, efisien, dan efektif dalam rangka peningkatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Pengetahuan, kemampuan, dan keahlian jajaran Pemerintah Kota Bima dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik – baiknya dalam mewujudkan pemerintah yang baik, masih perlu di tingkatkan.
3. Koordinasi dan Sinkronisasi program dan kegiatan masing-masing SKPD dan unit kerja, serta penyelarasan dengan program Pemerintah Kota Bima. dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kota Bima, masih belum maksimal.
4. Paradigma dan pola pikir beberapa aparatur pemerintah Kota Bima dalam pelaksanaan kegiatan masih berorientasi pada proses (belum berorientasi hasil) sehingga masih terdapat keinginan masyarakat kota bima dengan upaya dari aparatur Pemerintah Kota Bima belum sinkron.

BAB II Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Bima tahun 2016 pada prinsipnya merupakan turunan dari hal-hal yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 – 2018. Pada hakekatnya, sasaran dan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Bima diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bima Tahun 2013-2018.

Visi jangka menengah daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018 adalah merupakan penjabaran dari visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih, yaitu :

“TERWUJUDNYA KOTA BIMA SEBAGAI KOTA PERDAGANGAN DAN JASA
YANG BERIMAN, MAJU, ADIL DAN SEJAHTERA”.

Rencana Pembangunan Kota Bima tahun 2013-2018, berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kota Bima dalam segala bidang, guna menyiapkan kemajuan, kemandirian dan kemampuan bersaing. Dengan memperhatikan isu dan pencapaian visi Kota Bima

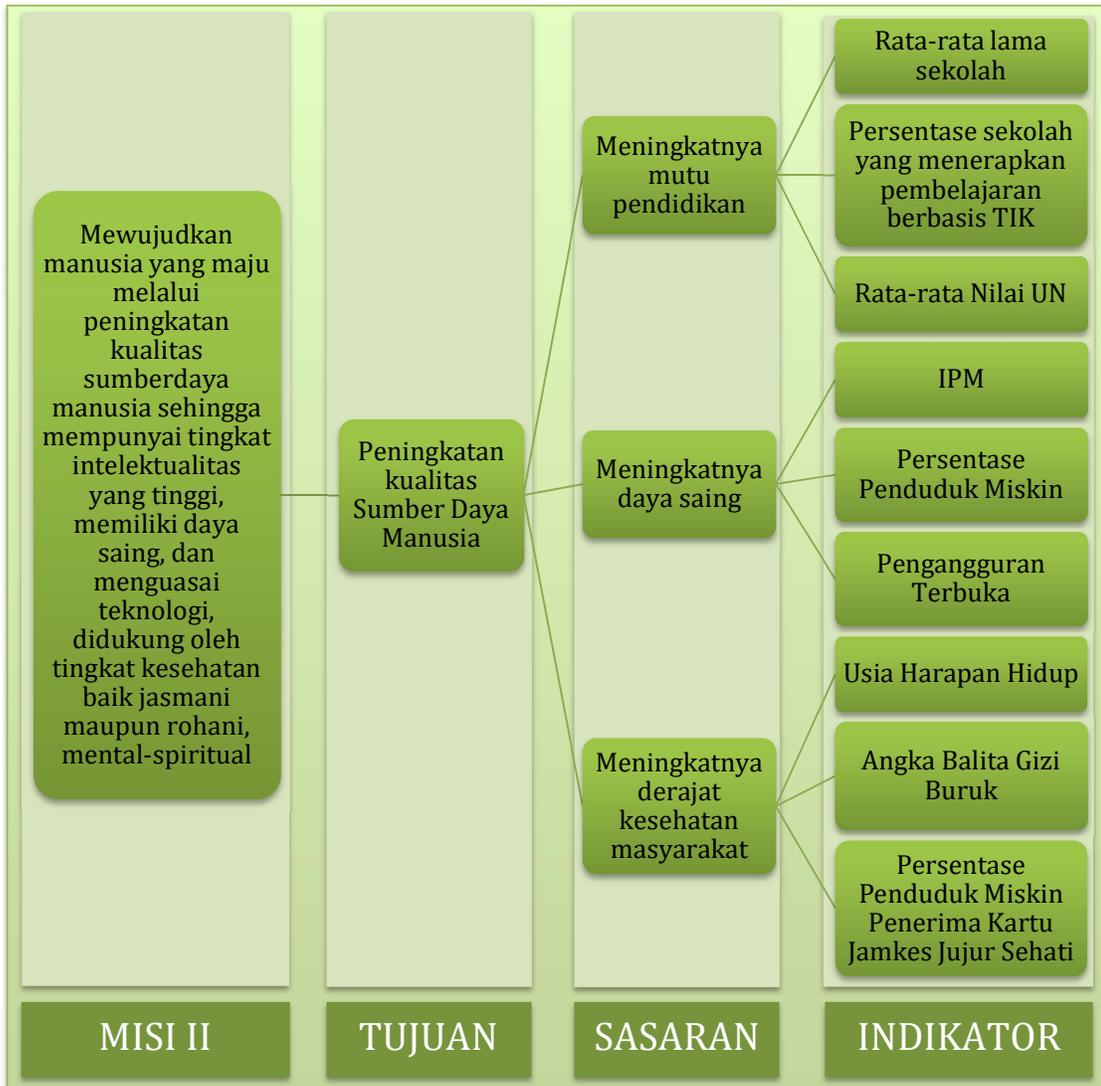
yang beriman, maju, adil dan sejahtera tersebut, maka dirumuskan 4 (empat) misi Kota Bima dalam rangka pencapaian visi Kota Bima 2013 – 2018.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi yang ada, dirumuskanlah kerangka yang jelas pada setiap misi, yang menyangkut tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran strategis pada setiap misi yang dioperasionalkan diharapkan mampu memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah.

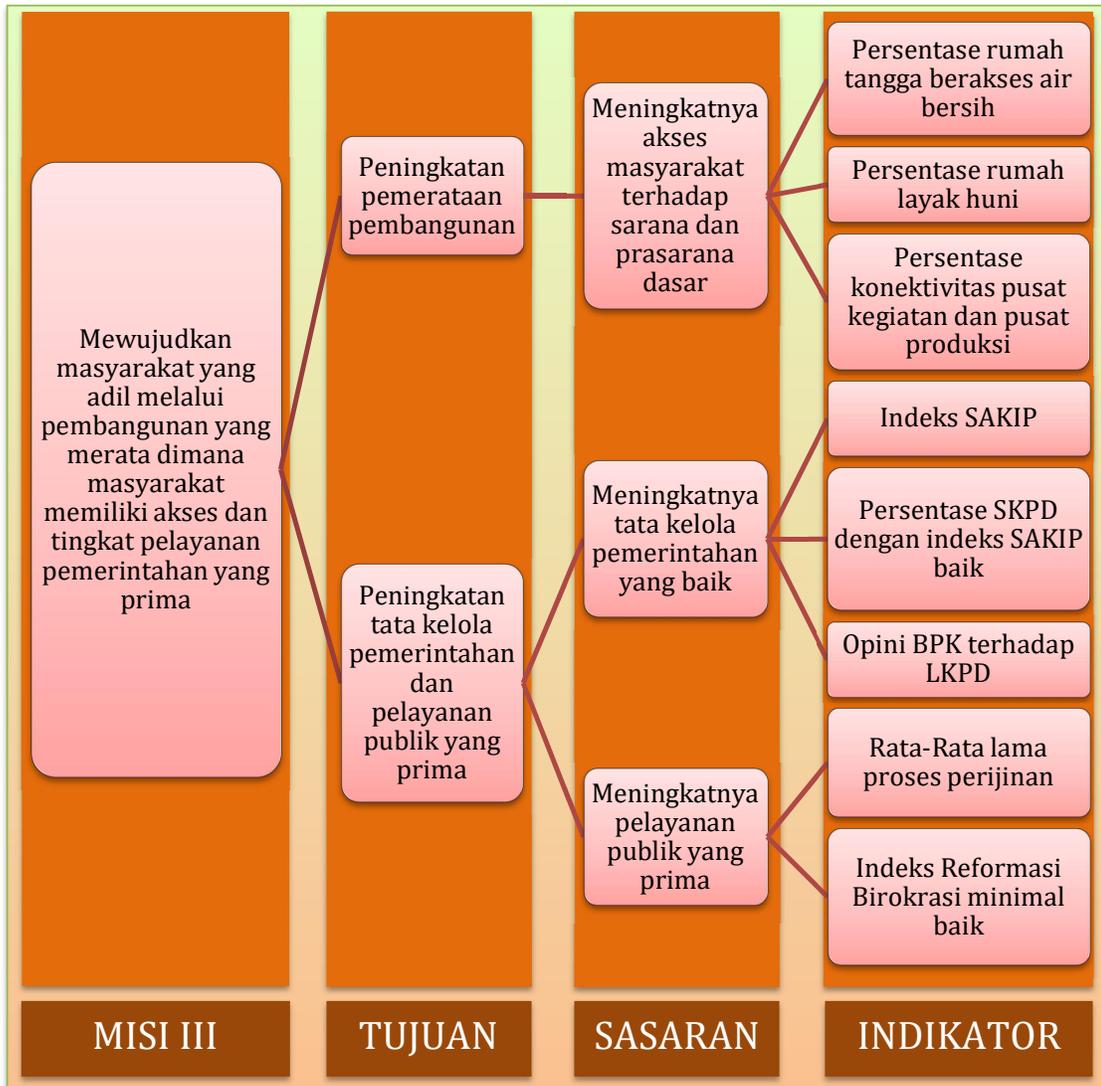
Secara lebih rinci, tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama pada pelaksanaan masing-masing misi pembangunan Kota Bima dapat dilihat pada skema diagram-diagram di bawah ini.



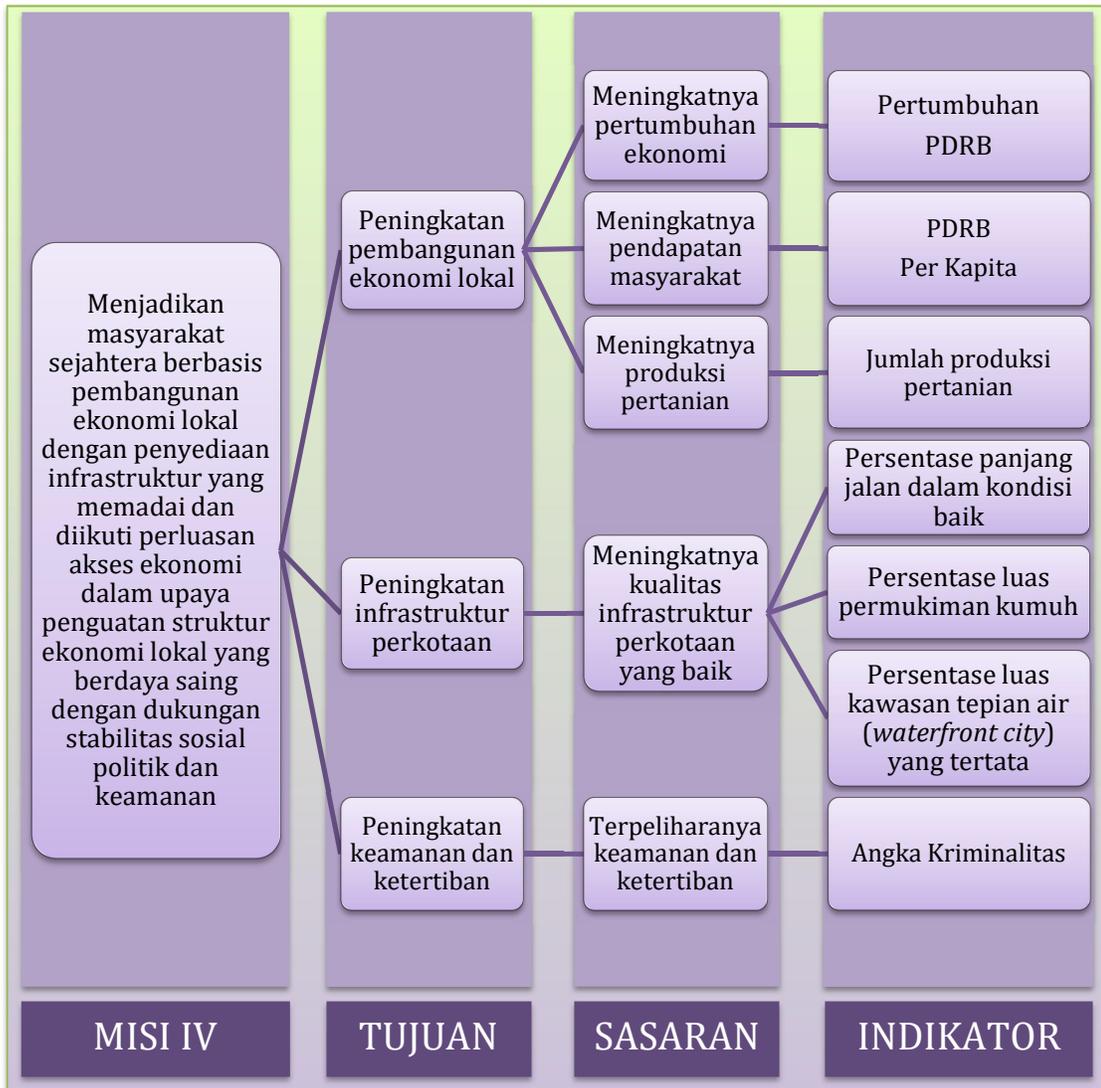
Gambar 3. Bagan Operasionalisasi Misi I menjadi Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja



Gambar 4. Bagan Operasionalisasi Misi II menjadi Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja



Gambar 5. Bagan Operasionalisasi Misi III menjadi Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja



Gambar 6. Bagan Operasionalisasi Misi IV menjadi Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018, maka ditetapkanlah Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun anggaran 2016 yang memuat pernyataan Walikota Bima dengan mencantumkan 14 (empat belas) sasaran strategis dan 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja utama.

Dokumen perjanjian kinerja Tahun 2016 tersebut menguraikan sasaran-sasaran strategis yang diprioritaskan untuk dicapai, indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran beserta target yang harus dicapai pada tahun 2016, program-program, dan anggaran yang disediakan untuk mendukung pencapaian masing-masing sasaran.

Uraian yang lebih rinci tentang Perjanjian kinerja Pemerintah Kota Bima tahun 2016 yang memuat Sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target kinerja disajikan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bima Tahun 2016

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama	Jumlah penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS)	Rupiah	750.000.000
2.	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Jumlah konflik SARA	kasus	0
3.	Lestarnya nilai-nilai budaya lokal	Sanggar seni yang aktif	%	100
4.	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,18
		Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	%	100
		Rata-rata nilai UN	nilai	6,96
5.	Meningkatnya daya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	72,23
		Persentase penduduk miskin	%	9,00
		Pengangguran terbuka	%	8,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	69,03
		Angka Balita Gizi Buruk	%	2,20
		Persentase penduduk miskin penerima kartu Jaminan Kesehatan 'JUJUR SEHATI'	%	100,00
7.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	Persentase Rumah Tangga berakses air bersih	%	90,00
		Persentase Rumah Layak Huni	%	100,00
		Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi	%	100,00
8.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks SAKIP	Nilai	56,01
		Persentase SKPD dengan indeks SAKIP baik	%	76,47
		Opini BPK terhadap LKPD	Opini	WTP
9.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan	hari	1,00
		Indeks Reformasi Birokrasi minimal baik	nilai	65,01
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	6,00
11	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Per Kapita	Juta Rupiah	14,75
12	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian tanaman pangan	ton	58.668
13	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	%	70%
		Persentase luas permukiman kumuh	%	2,50
		Persentase luas kawasan tepian air (<i>waterfront city</i>) yang tertata	%	10,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
14.	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas	%	96,25

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bima.

Untuk memudahkan dalam menarik kesimpulan, dilakukan atribusi penilaian menggunakan skala ordinal sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. Skala Ordinal sebagai Perangkat Penilaian

No.	Jumlah Nilai	Kategori
1.	85 sampai dengan 100	Berhasil
2.	70 s/d kurang dari 85	Cukup Berhasil
3.	55 s/d kurang dari 70	Kurang Berhasil
4.	Kurang dari 55	Tidak Berhasil

A. Capaian Kinerja

Penyajian capaian kinerja Pemerintah Kota Bima, untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Analisis capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi tahun 2016, membandingkan antara realisasi serta capaian kinerja tahun 2016 dengan tahun 2015 serta dengan melakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja disertai alternatif solusi yang telah dilakukan.

Kategori keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun 2016, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6. Keberhasilan Pencapaian Sasaran Tahun 2016

No.	Kategori	Sasaran	Persentase Capaian
1.	Berhasil	14	100,00 %
2.	Cukup Berhasil	-	0,00 %
3.	Kurang Berhasil	-	0,00 %
4.	Tidak Berhasil	-	0,00 %

Dari capaian indikator kinerja yang dihasilkan bahwa sasaran yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2016 dikategorikan berhasil sebesar 100,00%. Rincian pencapaian masing-masing sasaran strategis tersebut dideskripsikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7. Pencapaian Kinerja Masing-Masing Sasaran Strategis Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama	185,51
2.	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	100,00
3.	Lestarinya nilai-nilai budaya lokal	100,00
4.	Meningkatnya mutu pendidikan	89,67
5.	Meningkatnya daya saing	102,88
6.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	101,05
7.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	96,27
8.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	100,99
9.	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	130,00
10.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	99,47
11.	Meningkatnya pendapatan masyarakat	99,53
12.	Meningkatnya produksi pertanian	100,11
13.	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	99,56

No	Sasaran Strategis	Persentase Capaian
14.	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	102,18

Dari capaian kinerja masing-masing sasaran strategis, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase capaian 14 sasaran tersebut sebesar 107,65 %. Persentase capaian terendah adalah Sasaran Strategis ke-4, yaitu meningkatnya mutu pendidikan sebesar 89,67%. Adapun persentase capaian tertinggi dicatatkan oleh Sasaran Strategis ke-1, yaitu meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama sebesar 185,51%.

Kategori keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun 2016, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8. Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Tahun 2016

No.	Kategori	Indikator Kinerja	Persentase Capaian
1.	Berhasil	24	88,88 %
2.	Cukup Berhasil	2	7,41 %
3.	Kurang Berhasil	-	-
4.	Tidak Berhasil	1	3,71 %
Jumlah		27	100,00 %

Capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun 2016 dikategorikan 88,88% berhasil tercapai, 7,41% cukup berhasil, dan 3,71% tidak berhasil. Berdasarkan Penetapan Kinerja tahun 2016 dan realisasi kinerja pada tahun 2016, maka capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran dijelaskan sebagaimana termuat pada tabel berikut.

Tabel 9. Pencapaian Masing-Masing Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2015

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama	Jumlah penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS)	Rupiah	750.000.000	1.391.336.000	185,51
2	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Jumlah konflik SARA	kasus	0	0	100,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
3	Lestarnya nilai-nilai budaya lokal	Sanggar seni yang aktif	%	100,00	100,00	100,00
4	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	tahun	10,18	9,58	100,00
		Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK	%	100	84,21	84,21
		Rata-rata nilai Ujian Nasional (UN)	nilai	6,96	5,49	84,82
5	Meningkatnya daya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	nilai	72,23	72,23	100,00
		Persentase penduduk miskin	%	9,00	9,74	110,88
		Pengangguran terbuka	%	8,00	8,69	97,76
6	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	tahun	69,03	69,03	100,00
		Angka Balita Gizi Buruk	%	2,20	3,15	103,17
		Persentase penduduk miskin penerima kartu Jaminan Kesehatan 'JUJUR SEHATI'	%	100,00	100,00	100,00
7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	Rumah tangga pengguna berakses air bersih	%	90,00	80,84	95,10
		Persentase Rumah Layak Huni	%	100,00	92,77	92,77
		Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat distribusi	%	100,00	98,69	100,96
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks SAKIP	nilai	56,01	51,51	102,99
		Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	opini	WTP	WTP	100,00
		Persentase SKPD dengan Indeks SAKIP bernilai baik	%	76,47	64,71	100,00

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
9	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan	hari	1,00	1,25	260,00
		Indeks Reformasi Birokrasi minimal baik	nilai	65,01	0,00	0,00
10	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan PDRB	%	6,00	5,62	99,47
11	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	PDRB Per Kapita	Juta rupiah	14,75	14,68	99,53
12	Meningkatnya produksi pertanian	Jumlah produksi pertanian (tanaman pangan)	ton	58.668	52.892	100,11
13	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik	%	70,00	67,16	103,32
		Persentase luas permukiman kumuh	%	2,50	3,43	102,00
		Persentase luas kota yang tertata	%	10,00	2,53	93,37
14	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas	%	96,25	97,36	102,18

Dari hasil Capaian Indikator Kinerja tahun 2016 pada tabel di atas, rata-rata persentase capaian adalah sebesar 104,37%, dengan nilai persentase capaian terendah sebesar 0,00% yaitu pada capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, dan capaian persentase tertinggi adalah sebesar 260,00% yaitu pada capaian indikator kinerja rata-rata lama proses pelayanan perijinan.

Dalam rangka pencapaian indikator kinerja tersebut, maka disusunlah sejumlah program dan kegiatan. Adapun rincian program dan kegiatan berikut kendala/hambatan, upaya dan dukungan yang terjadi pada masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis dideskripsikan sebagai berikut.

1. Sasaran Strategis Meningkatnya Kepatuhan terhadap Ajaran Agama

Pencapaian sasaran strategis ini diimplementasikan ke dalam indikator kinerja utama jumlah penerimaan zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS). Indikator kinerja penerimaan jumlah zakat, infaq dan shodaqoh pada tahun 2016 berhasil jauh melampaui target, yaitu hingga sebesar 546,67% dari target yang ditetapkan pada perjanjian kinerja tahun 2016. Pencapaian ini jauh dibandingkan pencapaian pada tahun 2015 yang memenuhi capaian hingga 185,51%, yaitu dari target Rp. 750.000.000,00. Adapun pada tahun 2014, capaian kinerja indikator ini sebesar 104,67%; dari target sebesar Rp.750.000.000,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 785.000.000,00.



Tabel 10. Capaian Penerimaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Tahun 2014-2016

Tahun Capaian Kinerja	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
Tahun 2014	750.000.000	785.000.000	104,67%
Tahun 2015	750.000.000	1.391.336.000	185,51%
Tahun 2016	750.000.000	4.100.000.000	546,67%

Sumber : Bagian Kesra Setda Kota Bima, 2016

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja indikator penerimaan jumlah zakat, infaq dan shodaqoh tahun 2016 lebih baik apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut didukung dengan makin intensnya sosialisasi kepada para dermawan khususnya dan masyarakat Kota Bima pada umumnya tentang pentingnya berzakat, infaq dan sedekah.

Terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, maka dapat disebutkan bahwa sumber daya yang tersedia (meliputi sumberdaya anggaran, sumberdaya manusia maupun sumberdaya kelembagaan) telah dipergunakan secara efisien dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini.

2. Sasaran Strategis Meningkatnya Kerukunan Hidup Beragama

Kerukunan umat beragama adalah merupakan bagian dari kerukunan nasional. Ia menjadi inti dari kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam masyarakat. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kerukunan atau keharmonisan hidup beragama tersebut adalah proses dan suasana kehidupan beragama dari umat dan pemeluk agama yang plural secara serasi dalam kehidupan bangsa, dimana agama-agama yang berbeda dapat dapat diamalkan oleh pemeluknya tanpa berbenturan satu dengan lain.

Salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis meningkatnya kerukunan hidup beragama adalah jumlah konflik bernuansa SARA yang terjadi. Seperti diketahui bahwa kerapnya terjadi konflik yang bernuansa SARA di beberapa wilayah Indonesia beberapa tahun lalu sedikit banyak telah mempengaruhi situasi psikologis dan sosiologis keagamaan masyarakat, sehingga dikhawatirkan antara kelompok agama akan diliputi perasaan tidak aman dan tidak nyaman. Dengan demikian, merupakan sesuatu hal yang penting untuk tetap menjaga persaudaraan kemanusiaan dan persaudaraan kebangsaan.

Capaian indikator kinerja jumlah konflik SARA yang terjadi pada tahun 2016 dapat dikatakan 100% tercapai; dimana tidak terjadi kasus bernuansa SARA di Kota Bima sebagaimana yang telah ditargetkan sebelumnya (nol kasus). Capaian tahun 2016 ini mempertahankan capaian tahun 2014-2015 yang juga tidak terjadi kasus konflik bernuansa SARA di Kota Bima.

Tabel 11. Capaian Kinerja Jumlah Konflik SARA yang terjadi di Kota Bima

Tahun Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tahun 2014	0 kasus	0 kasus	100,00%
Tahun 2015	0 kasus	0 kasus	100,00%
Tahun 2016	0 kasus	0 kasus	100,00%

Sumber : *Bagian Kesra Setda Kota Bima, 2016*

Keberhasilan Pemerintah Kota Bima untuk memelihara kerukunan umat beragama ini tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Bima yang senantiasa membangun, mempertahankan, memperkuat dan melestariakan kerukunan umat beragama dengan berupaya melakukan beberapa program atau agenda penting; diantaranya adalah melalui pemberdayaan forum kerukunan umat beragama.

FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dibentuk oleh unsur-unsur pemuka agama dan tokoh masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bima. Tugasnya adalah melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan walikota, mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat.



Ket. Gambar : Suasana Rapat FKUB Kota Bima

Terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya, maka dapat disebutkan bahwa sumber daya yang tersedia (meliputi sumberdaya anggaran, sumberdaya manusia maupun sumberdaya kelembagaan) telah dipergunakan secara efisien dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini.

Program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima melalui Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kota Bima yang bersumber dari APBD Kota Bima Tahun 2016, antara lain :

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, yang dioperasionalkan ke dalam sejumlah kegiatan strategis, yaitu :
 - 1) Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
 - 2) Koordinasi forum antar etnis
- b. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, yang dioperasionalkan ke dalam sejumlah kegiatan strategis, yaitu :
 - 1) Peningkatan Pelaksanaan Pengkajian Masalah Strategis
 - 2) Penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - 3) Koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial

3. Sasaran Strategis Lestarinya Nilai-Nilai Budaya Lokal

Nilai-nilai kearifan lokal tidak dapat dilepaskan dari kebudayaan masyarakat yang mendukungnya. Salah satu indikator penting untuk mengukur Pencapaian sasaran strategis pelestarian nilai-nilai budaya lokal diimplementasikan ke dalam indikator persentase sanggar seni yang aktif.

Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2016, terdapat 64 sanggar seni di Kota Bima, dan seluruhnya berstatus aktif. Artinya sanggar seni yang aktif mencapai 100%. Persentase jumlah sanggar seni yang aktif pada tahun 2015 ini sama dengan pencapaian tahun sebelumnya, yaitu sebesar 100%.

Tabel 12. Capaian Kinerja Persentase Sanggar seni yang Aktif

Tahun Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tahun 2014	100 %	100 %	100 %
Tahun 2015	100 %	100 %	100 %
Tahun 2016	100 %	100 %	100 %

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bima, 2016

Eksistensi sejumlah sanggar seni di Kota Bima menunjukkan sinyal positif dalam rangka upaya melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Sanggar-sanggar seni tersebut berperan sebagai wadah pewarisan budaya lokal yang sesuai dengan budaya masyarakat Bima.



Ket. Gambar : Istri Walikota Bima (didampingi pejabat lainnya) mengenakan pakaian adat tradisional Bima (*rimpu*) dalam sebuah acara

Pemerintah Kota Bima terus berupaya memelihara keberadaan sanggar-sanggar seni dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya lokal, yang didukung dengan adanya faktor-faktor, antara lain bahwa budaya lokal Bima merupakan aset yang tidak dapat disamakan dengan budaya lokal di daerah lain. Hal ini menjadikan nilai-nilai budaya lokal Bima memiliki kekhasan tersendiri.

Meskipun demikian, terdapat pula sejumlah kendala sekaligus sebagai tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Bima dalam melestarikan nilai-nilai budaya lokal, antara lain :

- kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya lokal sekarang ini masih terbilang minim. Masyarakat lebih memilih budaya asing yang lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman.
- Pembelajaran tentang budaya, harus ditanamkan sejak dini. Namun sekarang ini banyak yang sudah tidak menganggap penting mempelajari budaya lokal.



Ket. Gambar : Salah satu sanggar seni di Kota Bima (Sanggar Seni *Paju Monca*) sedang menggelar latihan di Museum *Asi Mbojo*

Terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya manusia, maka dapat disebutkan bahwa sumberdaya manusia yang tersedia telah dimanfaatkan secara efisien dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini. Selain itu, pemanfaatan sumberdaya anggaran telah dilaksanakan melalui sejumlah program dan kegiatan pembangunan.

Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima yang bersumber dari APBD Kota Bima Tahun 2015 dalam rangka pencapaian target kinerja sasaran strategis pelestarian nilai-nilai budaya, antara lain :

a. Program Pengembangan Nilai Budaya

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu :

- Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini diimplementasikan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan, yaitu :

- Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya
- Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air
- Pengembangan kebudayaan dan pariwisata

- Pengawasan, Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya
- c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- Beberapa kegiatan strategis yang dilaksanakan, yaitu :
- Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah
 - Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah
 - Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah
 - Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya
- d. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata
 - Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata
 - Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
- e. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
- Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
 - Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga/dunia usaha

4. Sasaran Strategis Meningkatnya Mutu Pendidikan

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya mutu pendidikan ini dioperasinalisasikan melalui sejumlah indikator kinerja, yaitu angka rata-rata lama sekolah, persentase satuan pendidikan yang menerapkan pembela-jaran



Ket. Gambar : Walikota Bima memberikan pengarahan bagi siswa SMA di Kota Bima

berbasis TIK, dan rata-rata nilai Ujian Nasional (UN).

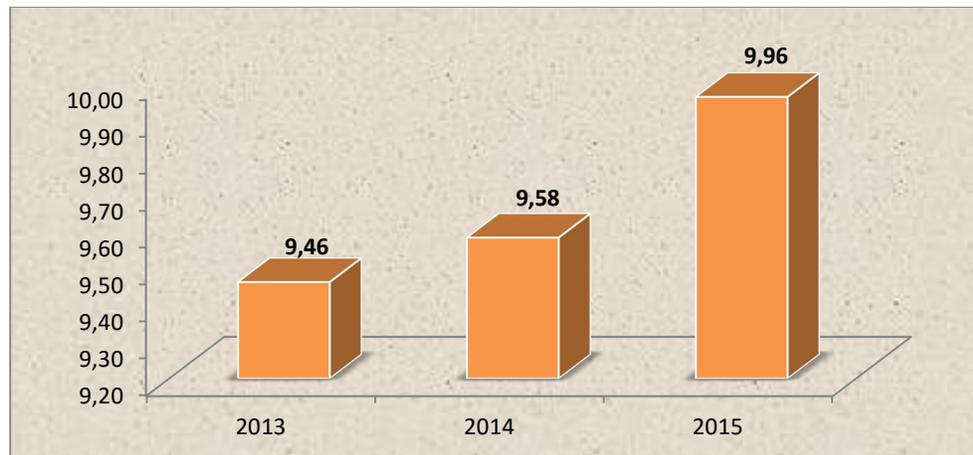
Adapun pencapaian masing-masing indikator tersebut dideskripsikan secara lebih terperinci sebagaimana pembahasan berikut.

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia, khususnya pada aspek pendidikan. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki.

Data Angka Rata-Rata Lama Sekolah yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima pada tahun 2016 merupakan data capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bima untuk tahun 2015. Ini berarti bahwa data capaian Angka Melek Huruf Kota Bima untuk tahun 2016 hingga saat ini belum tersedia karena data tersebut baru akan di-*release* oleh BPS Kota Bima pada pertengahan tahun 2017.

Menurut data BPS tahun 2016, Angka Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bima hingga tahun 2015 adalah 9,96 tahun. Angka ini terus meningkat selama kurun tiga tahun terakhir, dimana rata-rata lama sekolah pada tahun 2012 sebesar 9,30 tahun dan pada tahun 2013 mencapai 9,46 tahun.



Gambar 7. Grafik Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kota Bima Tahun 2013-2015

Peningkatan angka rata-rata lama sekolah Kota Bima yang terus meningkat pada setiap tahun didukung oleh :

- makin membaiknya sarana-sarana pendidikan
- dukungan beasiswa
- biaya operasional sekolah (BOS)

- serta makin sadarnya masyarakat akan pentingnya pendidikan.

Pemerintah Kota Bima melalui SKPD terkait terus berupaya melakukan peningkatan kinerja capaian rata-rata lama sekolah di Kota Bima yang didukung pula dengan jumlah anggaran urusan pendidikan yang cukup besar dan kualitas sumberdaya manusia yang memadai.

Pemerintah Kota Bima terus berupaya melakukan pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, serta adanya penguatan tata kelola dan akuntabilitas.

Beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima yang bersumber dari APBD Kota Bima Tahun 2016 dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Rata-Rata Lama Sekolah, antara lain :

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- c. Program Pendidikan Menengah
- d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

b. Persentase Sekolah yang Menerapkan Pembelajaran Berbasis TIK

Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau *ICT based learning* menggambarkan kecanggihan teknologi yang dimanfaatkan dalam pembelajaran. Peluang baru yang dijanjikan teknologi ini sangat luas. Kreativitas pendidik menjadi penting, karena tanpanya teknologi ini tidak akan berarti apa-apa.

Pemanfaatan pembelajaran TIK di sekolah merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Bima dalam rangka mendayagunakan media teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Keberhasilannya sangat tergantung pada komitmen dari berbagai pihak, meliputi kepala sekolah, guru, orang tua siswa, dan juga siswa itu sendiri.

Data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima menyebutkan bahwa persentase sekolah (dari jenjang pendidikan SD hingga jenjang pendidikan SMA) yang ditargetkan menerapkan pembelajaran berbasis TIK pada tahun 2015 telah terealisasi sebesar 84,21%. Secara lebih rinci, jumlah

sekolah ditargetkan menerapkan pembelajaran berbasis TIK tahun 2015 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 13. Jumlah Sekolah yang Menerapkan Pembelajaran Berbasis TIK Tahun 2015

Jenjang Pendidikan	Target	Realisasi	% Capaian
SD/MI	15	7	46,67 %
SMP/MTs	2	3	150,00 %
SMA/MA	1	3	300,00 %
SMK	1	3	300,00 %
Jumlah	19	16	84,21 %

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima, 2016

Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK pada tahun 2015 meningkat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari 19 sekolah di semua jenjang pendidikan yang ditargetkan, sebanyak 16 sekolah telah menerapkan pembelajaran berbasis TIK. Pada tahun sebelumnya, dengan target yang sama belum mampu direalisasikan pada satu sekolah pun; artinya capaian tahun 2014 masih 0%.

Tabel 14. Capaian Kinerja Persentase Sekolah yang Menerapkan Pembelajaran Berbasis TIK

Tahun Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tahun 2014	100 %	0,00 %	0,00 %
Tahun 2015	100 %	84,21 %	84,21 %

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima, 2016

Sejumlah kendala sekaligus tantangan yang dihadapi dalam implementasi pembelajaran berbasis TIK di Kota Bima, antara lain :

- Penyediaan infrastruktur TIK yang belum merata pada sekolah-sekolah
- Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan terkait pemahamannya terhadap pembelajaran berbasis TIK masih terus ditingkatkan.

Pemerintah Kota Bima melalui SKPD terkait terus berupaya melakukan peningkatan kinerja terkait jumlah sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK di Kota Bima. Hal ini didukung pula dengan ketersediaan anggaran serta kualitas sumberdaya manusia yang memadai. Pembelajaran berbasis TIK ini sangat memerlukan kreativitas guru dan pendidik, sehingga beberapa

program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima yang bersumber dari APBD Kota Bima Tahun 2015, antara lain melalui Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

c. Rata-Rata Nilai Ujian Nasional (UN)

Ujian Nasional biasa disingkat UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan.

Ujian Nasional (UN) bagi satuan pendidikan SMP/MTs, dan SMA/MA yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasilnya digunakan sebagai: (1) pemetaan mutu satuan dan/atau program pendidikan; (2) seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; (3) penentuan kelulusan peserta didik dari program dan/atau satuan pendidikan; dan (4) pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.



Ket. Gambar : Wakil Walikota Bima meninjau pelaksanaan UN

Data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima menyebutkan bahwa rata-rata nilai UN yang diselenggarakan pada tahun 2015 telah terealisasi sebesar 5,49 dari target rata-rata nilai UN sebesar 6,47. Artinya, capaian kinerja rata-rata nilai UN tahun 2015 sebesar 84,82%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2014, capaian kinerja rata-rata nilai UN tahun 2015 mengalami penurunan. Rata-rata nilai UN yang diselenggarakan pada tahun 2014 telah terealisasi sebesar 6,12 dari target rata-rata nilai UN sebesar 5,99. Artinya, capaian kinerja rata-rata nilai UN tahun 2014 sebesar 102,21%.

Tabel 15. Capaian Kinerja Rata-Rata Nilai UN Tahun 2015

Jenjang Pendidikan	Target	Realisasi	% Capaian
SD/MI/Paket A	7,01	5,60	79,89 %
SMP/MTs/Paket B	6,68	5,71	85,48 %
SMA/MA	6,30	5,21	82,70 %
SMK	5,90	5,44	92,20 %
Jumlah	6,47	5,49	84,82 %

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bima, 2016

Salah satu faktor pendukung dalam upaya peningkatan rata-rata nilai UN adalah hasil beberapa kajian yang memperlihatkan bahwa UN memberikan kontribusi bagi kegiatan pembelajaran di kelas, yang akhirnya tertuju pada peningkatan hasil belajar. Siswa mempersepsikan positif terhadap kegiatan UN, dan akhirnya akan memberikan motivasi pada diri siswa (*intrinsic motivation*) untuk belajar dengan giat dalam mempersiapkan UN. Pelaksanaan Ujian Nasional tahun 2015 juga dinilai lebih berkualitas karena UN bukan lagi menjadi penentu kelulusan sehingga atmosfer ketegangan pada siswa menjelang ujian pun berkurang.

Pemanfaatan sumberdaya anggaran telah dilaksanakan melalui sejumlah program dan kegiatan pembangunan. Beberapa program strategis yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bima dalam rangka pencapaian target indikator kinerja Rata-Rata Nilai Ujian Nasional, antara lain :

- a. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- b. Program Pendidikan Menengah

Selain itu, terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumberdaya manusia, maka dapat disebutkan bahwa sumberdaya manusia yang tersedia telah dimanfaatkan secara efisien dalam rangka pencapaian target indikator kinerja ini.

5. Sasaran Strategis Meningkatnya Daya Saing

Pencapaian sasaran strategis ini diimplementasikan ke dalam sejumlah indikator kinerja utama, yaitu :

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks pembangunan manusia yang dipergunakan untuk mengukur pencapaian hasil dari pembangunan suatu daerah atau wilayah dalam 3 dimensi dasar pembangunan yaitu : (1) lamanya hidup, (2) pengetahuan/tingkat pendidikan dan (3) standar hidup layak. Dimensi umur yang panjang dapat diukur dari indikator Angka Harapan Hidup, dimensi pengetahuan diukur dari indikator Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah, dan dimensi hidup layak diukur dari nilai pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Data IPM yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima pada tahun 2016 merupakan data capaian IPM Kota Bima untuk tahun 2015. Berdasarkan data, capaian IPM Kota Bima untuk tahun 2015 mencapai 72,99%. Deskripsi mengenai perkembangan IPM di Kota Bima sejak tahun 2011 terus menunjukkan peningkatan capaian, sebagaimana grafik berikut :



Gambar 8. Grafik Perkembangan IPM Kota Bima Tahun 2011-2015

Selanjutnya secara khusus Nilai IPM Kota Bima tahun 2015 mengalami kenaikan dengan mencapai angka 72,99. IPM Kota Bima menduduki peringkat ke-2 di Provinsi NTB, setelah Kota Mataram. Tingginya nilai IPM Kota Bima didukung oleh tingginya nilai komponen pembentuk IPM. Selanjutnya tingkat capaian masing-masing komponen IPM di Kota Bima yakni Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) mencapai 69,12 persen, Harapan Lama Sekolah (HLS) mencapai 14,95 Persen, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 9,96 Persen, dan Pengeluaran Per Kapita mencapai 9.594.

Untuk mendukung pencapaian IPM tersebut Pemerintah Kota Bima melakukan peningkatan kualitas program pada Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Koperindag, dan Dinas pekerjaan umum Kota Bima.

b. Persentase Penduduk miskin

Data angka kemiskinan Kota Bima terus mengalami penurunan. Sebagaimana telah dipublikasikan oleh BPS Kota Bima bahwa persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Kota Bima pada tahun 2014 sebesar 9,74%, mengalami penurunan sebesar 1,94 point jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 11,68%. Penurunan angka kemiskinan di Kota Bima sebesar 1,94 tersebut melebihi target yang ditetapkan sebesar 0,75% per tahun.

Target persentase angka kemiskinan pada tahun 2014 adalah sebesar 10,93%, menurun 0,75% dibanding persentase kemiskinan tahun sebelumnya. Dari target persentase angka kemiskinan 10,93% tersebut, realisasi persentase angka kemiskinan mencapai 9,74%. Artinya, capaian kinerja persentase angka kemiskinan mencapai 110,88%.

Tabel 16. Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin Tahun 2013-2015

Tahun Capaian Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Tahun 2013	11,60 %	11,68 %	99,31 %
Tahun 2014	10,93 %	9,74 %	110,88 %
Tahun 2015	9,00 %		

Sumber : Bappeda Kota Bima, 2016

Deskripsi mengenai perkembangan angka kemiskinan di Kota Bima selama 5 (lima) tahun terakhir, sebagai berikut :



Gambar 9. Grafik Angka Kemiskinan Kota Bima Tahun 2010-2014

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui persentase angka kemiskinan di Kota Bima mengalami penurunan setiap tahunnya. Adapun pencapaian kinerja indikator penurunan angka kemiskinan tahun 2015 mencapai 1,94 poin (258,67%) melebihi target sebesar 0,75 poin.

Beberapa kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bima diarahkan untuk pemenuhan 10 (sepuluh) hak dasar manusia sebagai berikut : pemenuhan hak atas pangan, pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan, pemenuhan hak atas pelayanan pendidikan, pemenuhan hak atas pekerjaan, pemenuhan hak atas rumah, pemenuhan hak atas tanah, pemenuhan hak atas air bersih, pemenuhan hak untuk berpartisipasi, pemenuhan hak atas layanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan pemenuhan hak rasa aman.

c. Pengangguran Terbuka

Data Pengangguran Terbuka yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima pada tahun 2016 merupakan data pengangguran terbuka Kota Bima untuk tahun 2015. Ini berarti bahwa data capaian Angka Melek Huruf Kota Bima untuk tahun 2016 hingga saat ini belum tersedia karena data tersebut baru akan di-*release* oleh BPS Kota Bima pada pertengahan tahun 2017.

Karakteristik ketenagakerjaan menurut lapangan usaha di Kota Bima pada tahun 2015 masih didominasi pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan, yaitu sebesar 36,21 persen. Sementara sektor perdagangan, rumah makan dan akomodasi berada di urutan kedua yaitu sebesar 19,41 persen.

Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas), lebih dari dua per tiga penduduk kota Bima termasuk dalam angkatan kerja. Tingginya proporsi penduduk usia kerja yang bekerja yaitu di atas 90% menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja Kota Bima sudah cukup baik. Meski demikian, tingkat pengangguran terbuka di Kota Bima mengalami fluktuatif. Hal ini ditunjukkan dari terjadinya penurunan tingkat pengangguran yang cukup signifikan dari tahun 2011 ke tahun 2012 menjadi 6,54 persen. Kemudian, naik menjadi 9,13 persen pada tahun 2013, dan mengalami penurunan kembali sebesar 0,44 persen pada tahun 2014 menjadi 8,69 persen.

Gambaran karakteristik ketenagakerjaan Kota Bima pada kurun empat tahun terakhir dapat dilihat dari hasil olah data Sakernas sebagaimana yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 17. Statistik Ketenagakerjaan Kota Bima Tahun 2011-2014

Uraian	2012	2013	2014	2015
TPAK (%)	67,51	66,39	69,32	
Tingkat Pengangguran (%)	6,54	9,13	8,69	
Bekerja	93,46	90,87	91,31	

Sumber : Hasil Olah Sakernas dengan Penimbang Hasil Proyeksi Kota Bima 2010-2035 (BPS, 2016)

Persentase pengangguran terbuka di Kota Bima mengalami penurunan dalam kurun dua tahun terakhir. Pencapaian kinerja persentase pengangguran terbuka tahun 2015 mencapai 8,69% melebihi target yang ditetapkan sebesar 8,50%.



Gambar 10. Grafik Persentase Tingkat Pengangguran di Kota Bima Tahun 2011-2014

Dalam rangka mendukung peningkatan pencapaian terkait penurunan tingkat pengangguran di Kota Bima, Pemerintah Kota Bima melakukan peningkatan kualitas program ketenagakerjaan pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Hal ini didukung pula oleh ketersediaan sumberdaya manusia yang memadai. Beberapa program strategis bidang ketenagakerjaan yang telah dilaksanakan, antara lain :

- Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

6. Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pencapaian sasaran strategis ini diimplementasikan ke dalam sejumlah indikator kinerja utama, yaitu :

a. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Data Angka Harapan yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima pada tahun 2015 merupakan data capaian Angka Harapan

Kota Bima untuk tahun 2014. Ini berarti bahwa data capaian Angka Harapan Hidup Kota Bima untuk tahun 2015 hingga saat ini belum tersedia karena data tersebut baru akan di-release oleh BPS Kota Bima pada pertengahan tahun 2016.

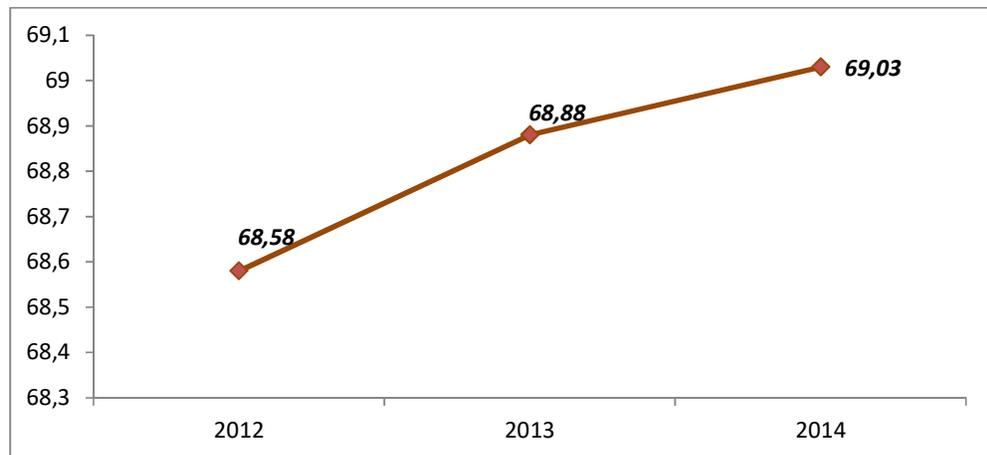
Menurut data BPS tahun 2015, Angka Harapan Hidup di Kota Bima hingga tahun 2014 adalah 69,03 tahun.

Tabel 18. Capaian Angka Harapan Hidup Kota Bima Tahun 2014

No.	Angka Harapan Hidup	Target	Realisasi	% Capaian
1.	AHH Tahun 2014	69,03 tahun	69,03 tahun	100,00%

Sumber : BPS Kota Bima, 2015

Capaian Angka Harapan Hidup selama tiga tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan. Data BPS Kota Bima menyebutkan bahwa Angka Harapan Hidup Kota Bima pada tahun adalah sebesar 69,03 tahun, sedangkan pada tahun 2013 adalah sebesar 68,88 tahun, dan pada tahun 2012 adalah sebesar 68,58 tahun.



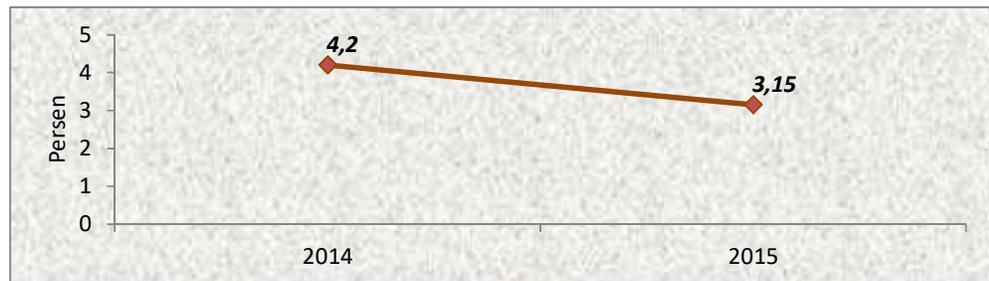
Gambar 11. Perkembangan Angka Harapan Hidup Kota Bima Tahun 2012-2014

b. Angka balita gizi buruk

Balita gizi buruk adalah Balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score <-3 SD (sangat kurus) dan/atau

terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor).

Target balita dengan gizi buruk pada tahun 2015 adalah berkurang 1% dari angka balita gizi buruk tahun sebelumnya. Ini berarti, pada tahun 2015 angka balita gizi buruk ditargetkan sebesar 3,2% dan terealisasi sebesar 3,15%. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan angka balita gizi buruk pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar 4,2%. Artinya, terdapat pengurangan presentase balita gizi buruk sebesar 1,05%.



Gambar 12. Grafik Perbandingan Angka Balita Gizi Buruk Tahun 2014-2015

Dilihat dari aspek penanganannya, cakupan penanganan kasus balita gizi buruk tahun 2015 adalah sebesar 100%, sama dengan capaian pada tahun 2014 yaitu sebesar 100%. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah sebesar 100%, maka target tersebut mampu dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Kota Bima.

Tabel 19. Capaian Kinerja Cakupan Penanganan Kasus Balita Gizi Buruk Tahun 2015

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Angka Balita Gizi Buruk	3,2 %	3,15 %	103,17%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima

Adapun keberhasilan menurunkan angka balita gizi buruk ini didukung dengan adanya kegiatan penjangkaran kasus secara bekal. Program lain yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah adanya kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan gizi buruk, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) gizi kurang, Pemberian Makanan Tambahan (PMT)-ASI, pemberian biaya perawatan gizi buruk, diskusi refleksi kasus gizi buruk rakorcam tentang hasil penimbangan balita.

c. Persentase Penduduk Miskin Penerima Kartu JAMKES 'JUJUR SEHATI'

Kartu Jaminan Kesehatan Jujur Sehati merupakan salah satu terobosan Pemerintah Kota Bima dalam rangka memberikan jaminan kesehatan dasar khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Penggunaan kartu jaminan kesehatan ini telah diberlakukan tanggal Bulan Juni 2014 yang lalu. Masyarakat Kota Bima yang memegang kartu jaminan kesehatan tersebut tidak lagi dibebani dengan biaya berobat.



Implementasi pemanfaatan kartu jaminan kesehatan JUJUR SEHATI ini dimulai pada tahun 2014, tepatnya di Bulan Juni. Untuk tahap pertama tahun lalu, Kartu Jujur Sehati sudah terbagi sebanyak 35.989. Adapun pada tahun 2015, jumlah kartu JUJUR SEHATI yang telah didistribusikan mencapai 40.000 kartu.

Tabel 20. Capaian Kinerja Persentase Penduduk Miskin Penerima Kartu Jamkes JUJUR SEHATI Tahun 2015

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Penduduk Miskin Penerima Kartu Jamkes JUJUR SEHATI	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2016

Penggunaan Kartu Jujur Sehati baru terbatas hanya pada Puskesmas dan jaringannya seperti Poskesdes dan Polindes. Masyarakat sasaran yang mendapatkan kartu ini pun, hanya untuk masyarakat yang tidak memiliki kartu jaminan kesehatan lain seperti BPJS, Jamkesmas ataupun Askes.

Kartu Jujur Sehati ini hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas. Namun dalam kondisi tertentu, ketika pelayanan tidak bisa

terpenuhi di Puskesmas, rujukan bisa dilakukan ke RSUD yang biayanya menjadi tanggungan Pemerintah Daerah melalui APBD.

Tabel 21. Laporan Kunjungan dan Rujukan Pasien Penerimaan Manfaat Kartu JUJUR SEHATI Tahun 2015

Tahun	Rawat Jalan	Rawap Inap	Rujukan	Jumlah
2014	15.327	274	129	15.730
2015	48.344	723	45	49.112

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2016

7. Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap Sarana dan Prasarana Dasar

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar diukur melalui kinerja sejumlah indikator utama, yaitu :

a. Persentase rumah tangga berakses air bersih

Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat.

Jumlah rumah tangga pengguna air bersih di Kota Bima pada tahun 2015 ditargetkan mencapai 85% namun baru terealisasi 80,84% atau capaian kinerja 95,10%. Realisasi tersebut lebih tinggi 4,63% dibanding tahun 2014, di mana rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2014 adalah sebesar 76,21%. Untuk meningkatkan jumlah rumah tangga pengguna air bersih telah dilaksanakan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Limbah, di mana dari program tersebut telah terpasang penyediaan air minum perpipaan baik berupa pembangunan jaringan air bersih maupun pemasangan sambungan rumah.

Tabel 22. Capaian Kinerja Rumah Tangga Berakses Air Bersih Tahun 2015

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase rumah tangga berakses air bersih	85%	30.177/37.330 (80,84 %)	95,10%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima



Gambar 13. Grafik Perkembangan Rumah Tangga berakses Air Bersih Tahun 2014-2015

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja rumah tangga berakses air bersih, antara lain :

- Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
- Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program prakarsa permukiman 100 0 100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.

Selain faktor-faktor pendorong keberhasilan, terdapat pula beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain :

- Masih adanya sebagian masyarakat yang kurang sadar tentang perilaku pola hidup bersih dan sehat.
- Masih adanya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program untuk sasaran strategis ini antara lain ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Adapun strategi pemecahan terhadap masalah yang dihadapi terkait peningkatan persentase rumah tangga berakses air bersih ini, antara lain :

- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan air.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan program-program yang terkait dengan penyediaan air bersih dan sanitasi untuk kawasan permukiman.
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat berpola hidup bersih dan sehat lebih baik lagi.

b. Persentase Rumah Layak Huni yang dibangun

Jumlah Rumah Layak Huni yang dibangun di Kota Bima pada tahun 2015 sesuai data yang ada pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan (BPMPK) Kota Bima mencapai 466 unit, dari yang ditargetkan sebesar 502 unit. Ini berarti persentase realisasi ini sebesar 92,77%.

Rumah layak huni yang dibangun ini meningkat bila dibandingkan tahun 2014, dimana pada tahun 2014 ditargetkan Rumah layak huni yang dibangun sebanyak 150 unit dengan realisasi hanya 57 unit atau hanya 38,00%. Pembangunan rumah layak huni ini antara lain dilaksanakan melalui bantuan sosial bedah rumah.

Tabel 23. Capaian Kinerja Indikator Rumah Layak Huni Tahun 2015

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Rumah Layak Huni yang dibangun	100 %	92,77 %	92,77%

Sumber : SKPD terkait

Tabel 24. Rumah Layak Huni yang Dibangun Tahun 2015

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Realisasi
Rumah Layak Huni	502 unit	466 unit	92,77 %

Sumber : BPMPK Kota Bima

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja rumah layak huni, antara lain :

- Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program prakarsa permukiman 100 0 100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.
- Adanya kebijakan dari baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengurangi rumah tidak layak huni antara lain melalui program bantuan stimulant perumahan swadaya dan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja rumah layak huni, yaitu :

- Program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan sasaran strategis ini melibatkan banyak SKPD yang seringkali menimbulkan konflik kepentingan antar SKPD.
- Masih adanya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program untuk sasaran strategis ini antara lain ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Adapun strategi pemecahan terhadap masalah yang dihadapi terkait peningkatan persentase rumah layak huni, antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan antar SKPD sehingga terjadi sinergitas dan menghindari konflik dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sanitasi.
- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan program-program yang terkait dengan sanitasi, persampahan, air bersih, perumahan dan permukiman.
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat berpola hidup bersih dan sehat lebih baik lagi.

c. Persentase Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi

Konektivitas wilayah merupakan salah satu indikator utama yang menunjukkan adanya pemerataan pembangunan di daerah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap wilayah dalam Kota Bima telah

memiliki aksesibilitas yang baik dan tidak ada terdapat lagi wilayah yang terisolir.

Pada tahun 2015 konektivitas wilayah telah mencapai 98,69 persen yang dikontribusikan oleh adanya pembangunan jalan dan jembatan serta peningkatan jalan. Angka capaian tersebut melebihi target tahun 2015 dalam RPJMD yaitu yang hanya sebesar 97,75 persen atau tercapai 100,96 persen.

Tabel 25. Capaian Kinerja Persentase Konektivitas Pusat Kegiatan dan Pusat Produksi Tahun 2015

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi	97,75	98,69	100,96

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi, 2016

Angka 98,69 persen bukan berarti bahwa masih terdapat wilayah terisolir di Kota Bima, tapi menunjukkan bahwa masih ada beberapa ruas jalan pedesaan yang belum perkerasan dan dalam kondisi baik. Capaian kinerja tahun 2015 ini lebih tinggi dibandingkan dengan capaian pada tahun 2014 yang baru mencapai 97,37 persen.

Apabila dikaitkan dengan target jangka menengah sampai dengan tahun 2018, maka sampai tahun 2015 ini telah dicapai sebesar 98,69 persen atau tinggal 1,31 persen saja untuk dicapai dalam kurun waktu 3 tahun kedepan. Dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di Kota Bima yang cukup baik, maka target jangka menengah tersebut sangat mungkin dicapai pada tahun 2018 sebagai akhir periode RPJMD 2013-2018.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat percepatan konektivitas wilayah, yaitu antara lain kondisi topografi wilayah terutama di sebagian wilayah Kota Bima yang memiliki kemiringan dan kelerengan yang cukup tinggi sehingga menimbulkan kendala dalam pembukaan jalan baru karena memerlukan anggaran dan teknologi yang besar.

Adapun beberapa faktor kunci keberhasilan capaian kinerja konektivitas wilayah adalah antara lain adanya komitmen yang kuat dari pemerintah pusat

maupun pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan wilayah dan pemerataan pembangunan secara lebih luas.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dan pembiayaan yang dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja, maka sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, dalam rangka untuk lebih memantapkan lagi upaya pencapaian indikator konektivitas wilayah pada tahun-tahun berikutnya, maka pelaksanaan program pembangunan jalan dan jembatan, program peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan perlu untuk terus dilaksanakan dan ditingkatkan.

8. Sasaran Strategis Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

a. Indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bima pada tahun 2015 merupakan penilaian atas kinerja instansi pemerintah kota Bima Tahun 2014 dengan target nilai 50,01 dan terealisasi sebesar 51,51 (kategori CC/Cukup) atau capaian kinerja sebesar 102,99 %.

Kategori CC menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi yang cukup memadai dalam penggunaan anggaran jika dihubungkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang beroreansi pada hasil di pemerintah Kota Bima.

Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Bima Tahun 2014 terealisasi sebesar 51,51 (kategori CC/Cukup) terjadi peningkatan nilai kinerja sebesar 5,97 jika dibandingkan dengan capai kinerja tahun 2013 dengan nilai 45,54 dan terjadi peningkatan nilai kinerja sebesar 11,15, jika dibandingkan dengan capai kinerja tahun 2012 dengan nilai 40,36 (kategori C/kurang).



Faktor yang mendukung peningkatan nilai kinerja instansi pemerintah Kota Bima, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kota Bima telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi tahun 2013.
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima memuat visi, misi, dan tujuan yang disertai dengan ukuran target keberhasilan, memuat sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran serta target tahunan. RPJMD Kota Bima telah dipublikasikan melalui website Kota Bima
- 3) Kota Bima telah menetapkan secara formal Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Bima dan satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). IKU tersebut telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran;
- 4) Pengukuran Kinerja dilakukan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dan hasil pengukuran kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan.
- 5) Laporan Akuntabilitas Kinerja Kota Bima Tahun 2014 telah disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, demikian juga laporan Kinerja SKPD telah disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan Kinerja SKPD telah direviu oleh APIP;
- 6) Inspektorat Kota Bima, telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pencapaian kinerja serta evaluasi terhadap laporan kinerja SKPD. Evaluasi tersebut menggunakan pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja mengaju kepada pedoman evaluasi kinerja yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil Evaluasi Akuntabilitas kinerja SKPD telah ditindaklanjuti untuk memperbaiki perencanaan program dimasa yang akan datang. sedangkan hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.
- 7) Capaian Kinerja Kota Bima dan SKPD nya telah menampakkan kearah perbaikan.

Upaya yang akan dilakukan oleh Pemkot Bima untuk meningkatkan Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- 1) SKPD di lingkungan Kota Bima akan menetapkan hal-hal yang hendak dicapai dalam jangka menengah, yang dapat menjadi acuan dalam

menyusun perencanaan kinerja maupun perjanjian kinerja dimasa mendatang.

- 2) Kota Bima dan SKPD agar menyusun rencana aksi atas kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan target-target kinerja dalam dokumen perjanjian Kinerja.
- 3) Melakukan perbaikan terhadap IKU SKPD sehingga dapat menggambarkan keberhasilan SKPD dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya (sesuai dengan prinsip SMART)
- 4) Melakukan perbaikan terhadap ukuran kinerja Individu untuk tingkat eselon III dan IV yang merupakan turunan dari kinerja atasannya sehingga pencapaiannya dapat secara langsung mendukung kinerja atasannya.
- 5) Mengembangkan metode pengumpulan data kinerja yang mudah diterapkan sehingga capaian kinerja dapat diinformasikan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode pengumpulan kinerja paling tidak mempunyai pedoman pengumpulan data kinerja dan pihak-pihak yang diberi tanggungjawab untuk pengelolaan data kinerja. Dapat juga dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang sesuai dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Bima;
- 6) Laporan kinerja SKPD di lingkungan Kota Bima akan menginformasikan kerjanya dengan baik, terutama yang berkaitan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, serta informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi;
- 7) Meningkatkan kualitas evaluasi internal, dengan memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan evaluasi internal. Pedoman evaluasi internal akan disesuaikan dengan karakteristik implementasi Sistem AKIP di lingkungan Pemerintah Kota Bima, namun tetap mengacu kepada Pedoman Evaluasi yang diterbitkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 8) Kompetensi maupun kualitas evaluator akan ditingkatkan dengan pelatihan yang teratur. Dan evaluasi internal seharusnya dimulai dari

perencanaan yang didukung oleh semua aparat, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung;

- 9) Meningkatkan komitmen terhadap pencapaian kinerja atas dokumen-dokumen kinerja yang telah ditetapkan.

Program yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja penilaian kinerja instansi pemerintah daerah adalah program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capai kinerja dan keuangan, dengan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- b. Opini Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Bima yang dikeluarkan pada tahun 2015 merupakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah Kota Bima tahun 2014. dengan target opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan terealisasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan capaian kinerja 100%.



Hasil pemeriksaan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun 2014 capaian kerjanya terjadi kenaikan status opini jika dibandingkan dengan hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah Kota Bima tahun 2013 dan tahun 2012 dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan capaian tahun 2011 dengan Opini Disclaimer (Tidak menyatakan pendapat).

Peningkatan status opini dari BPK terhadap hasil pemeriksaan LKPD kota Bima menandakan semakin baiknya pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bima dari tahun ketahun.

Faktor yang mendukung capaian hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPD Kota Bima adalah sebagai berikut:

- 1) Komitmen kepala daerah dan seluruh jajaran pemkot Bima dalam meningkatkan pengelolaan keuangan daerah ke arah yang lebih baik sangat tinggi
- 2) Pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan LKPD bekerja sama dengan BPKP perwakilan NTB
- 3) Pengelolaan keuangan daerah dan barang daerah dengan menggunakan aplikasi SIMDA dan SIMBADA

Upaya yang akan dilakukan oleh pemkot Bima untuk meningkatkan capaian kinerja opini hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Kota Bima pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan
- 2) Memperbaiki pengelolaan Aset Daerah
- 3) Memperbaiki sistem penganggaran dan realisasi belanja , agar tidak terjadi salah penganggaran dan salah realisasi belanja
- 4) Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

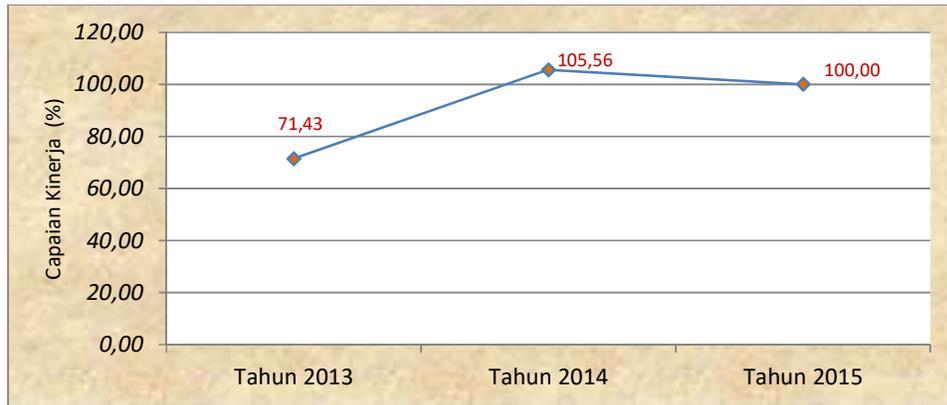
Program yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja opini pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan adalah:

- 1) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capai kinerja dan keuangan, dengan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan Daerah
- 2) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

c. Persentase SKPD dengan SAKIP baik

Persentase Indeks Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bagi SKPD di Kota Bima pada tahun 2015 merupakan penilaian atas kinerja SKPD Tahun 2015 dengan target sebanyak 64,71% SKPD bernilai baik (kategori B) dan mampu terealisasi sesuai target yang ditetapkan sehingga capaian kinerja sebesar 100,00 %.

Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja tahun 2015 mengalami penurunan secara persentase capaian kinerja. Meskipun demikian, jumlah SKPD yang nilai AKIP nya bernilai baik meningkat dari 19 SKPD menjadi 22 SKPD.



Gambaran tren realisasi dan capaian kinerja dalam 3 tahun terakhir sebagaimana terlihat pada tabel di atas menunjukkan bahwa masih rendahnya capaian kinerja pada tahun 2013 disebabkan oleh belum optimalnya penerapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi kinerja SKPD. Kendala terbesar dari belum optimalnya penerapan SAKIP sampai pada tahun 2013 adalah belum tersedianya Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD, sehingga belum bisa dilakukan penyesuaian secara memadai dengan dokumen perencanaan tingkat SKPD. Akhir tahun 2013 telah dibuat RPJMD baru dan diikuti oleh Renstra baru serta indikator kinerja utama yang baru pula. Sehingga sampai dengan tahun 2015 capaian kinerja untuk indikator Persentase SKPD yang penerapan SAKIP nya baik meningkat dan bahkan melebihi dari target yang diharapkan.

9. Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Publik yang Prima

Pemerintah daerah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang.

Tingkat keberhasilan peningkatan pelayanan publik di Kota Bima tergambar dari pencapaian beberapa indikator kinerja utama sebagai berikut :

a. Rata-rata lama proses pelayanan perijinan

Bahwa rata-rata lama setiap proses pelayanan perijinan di Kota Bima ditargetkan selama 2,25 hari dengan tingkat realisasi sebesar 1,25 hari. Berdasarkan data tersebut, maka tingkat capaian kinerja untuk indikator tersebut sebesar 260%. Bahwa tingkat capaian kinerja lama proses pelayanan perijinan di Kota Bima tahun 2015 mengalami peningkatan dibanding tahun 2014 sebanyak 188,89%. Adapun jenis pelayanan perijinan yang ada di Kota Bima Tahun 2015, diantaranya :

Tabel 26. Capaian Kinerja Lama Proses Perijinan di Kota Bima

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	Ijin Gangguan (HO)	4 hari	3 hari
2.	Surat Ijin Menempati Kios (SIMK)	2 hari	1 hari
3.	Surat Ijin Pangkalan Bahan Bakar Tanah (BBMT)	2 hari	1 hari
4.	Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	2 hari	1 hari
5.	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)	2 hari	1 hari
6.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	2 hari	1 hari
7.	Tanda Daftar Industri (TDI)	2 hari	1 hari
8.	Tandan Daftar Gudang (TDG)	2 hari	1 hari
Rata-Rata Lama Proses Pelayanan Perijinan		2,25 hari	1,25 hari

Sumber : Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu Kota Bima, 2015



Ket. Gambar : Wakil Walikota Bima saat melakukan inspeksi mendadak pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT)

Meningkatnya capaian kinerja indikator tersebut didukung oleh pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang intens oleh Pemerintah Kota Bima. Pelaksanaan sosialisasi tersebut mampu membangun pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam perijinan. Selain itu terdapat dukungan program peningkatan kualitas pelayanan perizinan (inventarisasi dan pelaporan perijinan, Penyediaan sarana, dan prasarana pelayanan, penyediaan informasi/data base perijinan, dan monev kegiatan pendataan) terus dilakukan oleh KPPT Kota Bima dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

b. Indeks Reformasi Birokrasi Minimal Baik

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah dilaksanakan hampir pada seluruh instansi pusat dan sebagian pemerintah daerah. Reformasi Birokrasi sebagai sebuah program nasional juga perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan pelaksanaan dan hasil dari pelaksanaan reformasi birokrasi dan juga untuk memberikan sebuah rencana aksi tindak lanjut perbaikan untuk periode berikutnya.

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang proporsional dengan karakteristik adaptif, bersinergitas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Dalam rangka terlaksananya tujuan Reformasi Birokrasi tersebut, Pemerintah Kota Bima telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) Pemerintah Kota Bima Tahun 2015-2019 melalui terbitnya Peraturan Walikota Bima Nomor 32 Tahun 2015.

Hingga akhir 2015, capaian indeks reformasi birokrasi Kota Bima masih belum tersedia, artinya capaian kinerjanya masih 0 %. Namun demikian, sejumlah upaya strategis yang mendukung kegiatan penilaian mandiri reformasi birokrasi di Kota Bima telah dilakukan yang diawali dengan terbitnya Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bima Tahun 2015-2019,

Perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bima, dan pembenahan sistem pelayanan publik.

10. Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Gambaran tingkat keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis meningkatnya pertumbuhan ekonomi dapat ditunjukkan oleh hasil pengukuran indikator kinerja pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Indikator kemajuan perekonomian suatu daerah dicerminkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah dengan memperhatikan Produk Domestik Regional bruto (PDRB). PDRB adalah total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah tertentu dalam waktu tertentu. Pengukuran capaian kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 di Kota Bima dapat ditunjukkan dari hasil data PDRB yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima Tahun 2015 yang isinya memuat kinerja pertumbuhan ekonomi daerah tahun 2014. Hal ini disebabkan oleh karena periodisasi proses penyusunan dokumen PDRB oleh BPS di setiap daerah Kabupaten dan Kota yang demikian adanya.

Besaran PDRB secara nominal yang dihasilkan Pemerintah Kota Bima pada tahun 2014 dihitung atas dasar harga berlaku (*current price*) adalah sebesar 2,7 triliun rupiah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, jumlah PDRB yang dihasilkan tersebut mengalami peningkatan setiap tahun dari 1,9 triliun rupiah pada tahun 2010. Demikian juga dengan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga konstan (*constant price*) tahun dasar 2010 adalah sebesar 2,3 triliun rupiah pada tahun 2014, meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penghitungan yang dilakukan dengan menggunakan harga konstan adalah untuk mengetahui pertumbuhan riil (pertumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh variabel harga) produksi barang dan jasa. Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga konstan tersebut dapat diketahui pertumbuhan ekonomi Kota Bima pada tahun 2014 adalah sebesar 5,62 persen. Dengan demikian capaian kinerja pertumbuhan ekonomi Kota Bima adalah sebesar 99,47 persen dari target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan yaitu sebesar 5,65 persen.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, maka Angka pertumbuhan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan

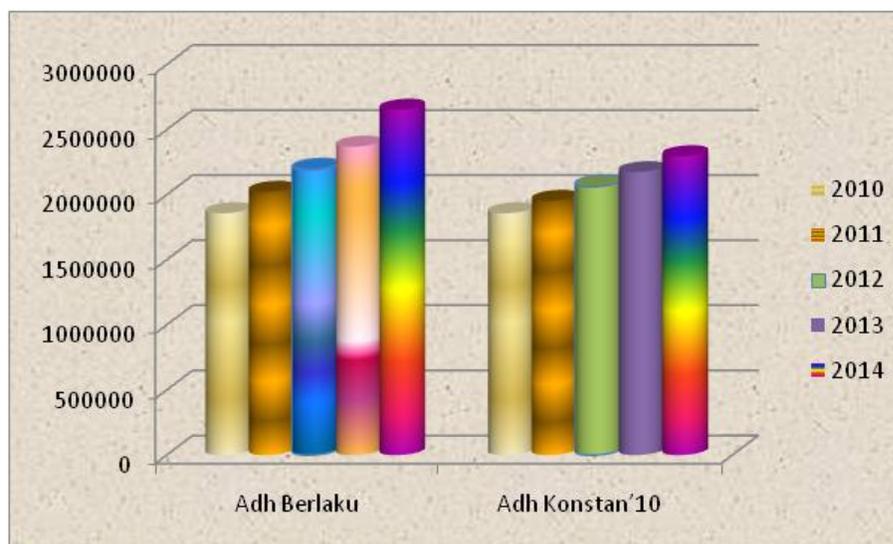
pertumbuhan PDRB tahun 2013 yang sebesar 5,40 persen. Secara rinci laju pertumbuhan ekonomi Kota Bima Tahun 2010 – 2014 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 27. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima Tahun 2010–2014

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)		Laju Pertumbuhan (%)	
	Adh Berlaku	Adh Konstan'10	Adh Berlaku	Adh Konstan'10
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010	1.857.963,3	1.857.963,3	-	-
2011	2.022.521,3	1.953.159,0	8,86	5,12
2012	2.192.206,8	2.062.497,3	8,39	5,60
2013	2.369.813,1	2.173.936,5	8,10	5,40
2014	2.653.586,3	2.296.217,3	11,97	5,62

Sumber : BPS Kota Bima, 2015

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pada periode tahun 2010-2014 Kota Bima telah mampu mengembangkan dan meningkatkan perekonomiannya daerahnya. Demikian juga diamati dari pertumbuhan riil barang dan jasa (pertumbuhan ekonomi) pada periode yang sama, senantiasa mengalami pertumbuhan yaitu dari pertumbuhan sebesar 5,12 persen pada tahun 2011 menjadi 5,62 persen pada tahun 2014.



Grafik PDRB Kota Bima Tahun 2010-2014

Ditinjau berdasarkan pertumbuhan masing-masing sektor, maka pertumbuhan ekonomi Kota Bima persektor dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini

Tabel 28. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bima pada masing-masing sektor Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2011-2014

	Kategori	2011	2012	2013	2014
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,75	4,03	1,78	3,70
B	Pertambangan dan Penggalian	5,23	6,44	(5,10)	6,56
C	Industri Pengolahan	2,89	4,78	5,17	4,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,80	12,43	25,14	23,14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,18	2,20	1,84	3,35
F	Konstruksi	6,88	6,03	5,76	6,40
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,12	8,55	9,03	6,54
H	Transportasi dan Pergudangan	4,56	4,52	5,04	5,79
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,38	6,63	6,86	4,61
J	Informasi dan Komunikasi	7,81	7,65	4,06	6,84
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,02	8,70	7,61	6,33
L	Real Estate	5,49	5,32	6,00	4,80
M, N	Jasa Perusahaan	4,52	7,37	4,89	6,87
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,51	3,48	3,36	4,92
P	Jasa Pendidikan	5,44	3,23	4,55	6,45
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,92	4,87	4,38	5,06
R,S, T,U	Jasa lainnya	6,80	7,50	7,54	7,85
	PDRB	5,12	5,60	5,40	5,62

Sumber : BPS Kota Bima, 2015

Lebih lanjut, capaian kinerja pertumbuhan ekonomi tersebut apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Kota Bima sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bima 2013 - 2018 yaitu sebesar 6,5 persen pada tahun 2018,

dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian dicapai saat sekarang adalah baru mencapai 86,46 persen. Dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dari PDRB tersebut serta pengelolaan pembangunan ekonomi di Kota Bima yang cukup baik dan dengan pertumbuhan yang positif, maka target jangka menengah sebesar 6,50 persen tersebut sangat mungkin dicapai pada tahun 2018 sebagai akhir periode RPJMD 2013-2018.

Pertumbuhan ekonomi Kota Bima sebesar 5,62 persen tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun yang sama yaitu hanya sebesar 5,06 persen. Sedangkan kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,02 persen, maka pertumbuhan ekonomi Kota Bima juga masih lebih tinggi.

Namun demikian, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kota Bima yaitu antara lain :

- a. Kondisi ekonomi dan stabilitas regional dan nasional sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah seperti tingkat inflasi, kenaikan harga BBM, serta stabilitas politik .
- b. Pertumbuhan sektor pertanian, kelautan dan perikanan yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca ekstrim seperti kemarau panjang dan gagal panen .

Sedangkan beberapa faktor kunci keberhasilan capaian kinerja pertumbuhan ekonomi adalah antara lain :

- a. Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menyelenggarakan reformasi birokrasi dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang berdampak pada membaiknya iklim investasi daerah.
- b. Tersedianya sumber daya alam yang baik sebagai modal dasar pembangunan daerah dimana ketersediaan lahan pertanian yang subur dan kekayaan laut memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan PDRB Kota Bima setiap tahunnya.
- c. Membaiknya kualitas infrastruktur perkotaan serta sarana dan prasarana pendukung sektor perdagangan dan jasa serta transportasi.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dan pembiayaan yang dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja, maka sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, dalam rangka untuk lebih



Ket. Gambar : Walikota Bima meninjau pasar tradisional Amahami

memantapkan lagi upaya pencapaian indikator kinerja pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun berikutnya, maka pelaksanaan program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, program pemanfaatan potensi sumber daya hutan, program rehabilitasi hutan dan lahan, program pengembangan budidaya perikanan, program pengembangan perikanan tangkap, program penciptaan iklim UKM yang kondusif, Program pengembangan sistem pendukung UMKM, program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri, program pengembangan industri kecil dan menengah, program pengembangan sentra-sentra industri potensial, program peningkatan pelayanan perijinan, program peningkatan disiplin aparatur, program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal, program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, program peningkatan kesempatan kerja perlu untuk terus dilaksanakan dan ditingkatkan.

11. Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan Kota Bima dalam upaya peningkatan pembangunan ekonomi lokal, salah satu sasaran yang hendak dicapai adalah meningkatnya pendapatan masyarakat. Dalam hal ini, indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah PDRB Per Kapita.



Ket. Gambar : Aktivitas menenun sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat

Pendapatan per kapita pada suatu daerah dapat diindikasikan oleh nilai PDRB per kapita pada tahun tertentu. PDRB per kapita merupakan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk dari nilai tambah yang tercipta selama satu tahun. PDRB per kapita biasa digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat secara makro. Laju pertumbuhan PDRB per kapita yang melebihi angka inflasi mencerminkan keadaan ekonomi masyarakat lebih baik, dan sebaliknya pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih rendah dari inflasi mencerminkan kesejahteraan masyarakat tidak meningkat. Angka PDRB perkapita diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama. Untuk mengetahui adanya pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat, dihitung dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Pertumbuhan PDRB dapat terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat akibat pertumbuhan penduduk dan atau perubahan harga yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB-nya.

Pendapatan perkapita penduduk berdasarkan harga konstan ditargetkan sebesar 14,75 juta rupiah dengan realisasi sebesar 14,68 juta rupiah atau dengan tingkat capaian 99,53 persen. Pertumbuhan pendapatan perkapita dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 29. PDRB Per Kapita Kota Bima Tahun 2011– 2014

Uraian	2011	2012	2013*	2014**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Atas Dasar Harga Berlaku				
PDRB Perkapita (juta rupiah)	13,81	14,63	15,48	16,97
Pertumbuhan (%)	6,40	6,00	5,77	9,61
II. Atas Dasar Harga Konstan 2000				
PDRB Perkapita (juta rupiah)	13,33	13,77	14,20	14,68
Pertumbuhan (%)	2,75	3,27	3,13	3,40

Sumber : BPS Kota Bima, 2015

Pada tahun 2014 PDRB per kapita Kota Bima atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan menjadi 16,97 juta rupiah atau meningkat sebesar 9,61 persen dari tahun sebelumnya yang dihitung sebesar 15,48 juta rupiah. Jika dilihat atas dasar harga konstan maka PDRB perkapita pada tahun 2014 adalah sebesar 14,68 juta rupiah yang mengalami peningkatan 3,40 persen dari tahun sebelumnya,

yang masih lebih tinggi dari laju pertumbuhan penduduk yang berada dikisaran 2,15 persen pada tahun 2014.

Pada tahun 2014, PDRB perkapita Kota Bima atas dasar harga berlaku mencapai 16,97 juta rupiah dengan pertumbuhan sebesar 9,61 persen dari angka tahun 2013. Selama tahun 2011-2013 pertumbuhan PDRB perkapita Kota Bima atas dasar harga berlaku adalah berturut-turut 6,40 persen, 6,00 persen, dan 5,77 persen.

Pendapatan perkapita yang dicapai sampai saat ini sebesar 16,97 juta rupiah jika dibandingkan dengan target RPJMD sampai dengan 2018 yang sebesar 20 triliun rupiah adalah baru mencapai 84,85 persen

Pendapatan perkapita Kota Bima tahun 2014 atas dasar berlaku sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan perkapita Propinsi NTB sebesar 17,27 juta rupiah atau sekitar 98,26 persen. Sedangkan apabila dibandingkan dengan pendapatan perkapita nasional, maka pendapatan perkapita Kota Bima masih cukup rendah atau hanya 40,59 persen dari pendapatan nasional perkapita yang sudah mencapai angka 41,81 juta rupiah pada tahun 2014 .

Berkaitan dengan penilaian penggunaan sumber daya yang dimiliki, apabila dilakukan perbandingan antara besaran sumber daya yang dikeluarkan dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi efisiensi dalam hal penggunaan sumber daya dan pembiayaan dengan capaian kinerja sebesar 99,53 persen. Lebih lanjut, dalam rangka lebih meningkatkan lagi pendapatan perkapita pada tahun-tahun yang akan datang, maka pelaksanaan program peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja, program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah, program pengembangan kewirusahaan dan keunggulan, program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, program peningkatan pelayanan perijinan, program peningkatan kesejahteraan petani, program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan, program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi, program pengembangan IKM perlu terus dioptimalkan.

12. Sasaran Strategis Meningkatnya produksi pertanian

Adapun gambaran tingkat keberhasilan dari pencapaian sasaran strategis meningkatnya produksi pertanian dapat ditunjukkan oleh hasil pengukuran indikator kinerja jumlah produksi pertanian, dalam hal ini produksi pertanian tanaman pangan.

Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang dapat menghasilkan karbohidrat dan protein. Indikator kinerja produksi pertanian tanaman pangan dalam konteks ini akan mencakup akumulasi dari produksi dari beberapa jenis komoditi yang meliputi: padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Adapun capaian kinerja produksi tanaman pangan Kota Bima tahun 2015 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 30. Capaian Kinerja Produksi Tanaman Pangan Kota Bima Tahun 2015

No.	Komoditi Tanaman Pangan	Target (ton)	Realisasi (ton)	%
1	Padi (GKP)	44.649	39.664	88,84
2	Jagung (PK)	3.551	8.028	226,08
3	Kedelai (BK)	2.245	2.201	98,04
4	Kacang Tanah (BK)	305	281	92,13
5	Kacang Hijau (BK)	9	11	122,22
6	Ubi Kayu (UB)	1.979	2.628	132,79
7	Ubi Jalar (UB)	92	79	85,87

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima

Tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa komoditi yang melebihi target yaitu komoditi jagung, kacang hijau dan ubi kayu. Sedangkan untuk komoditi ubi jalar dan padi memiliki tingkat capaian target yang paling sedikit yaitu dibawah 90%.



Ket. Gambar : Wakil Walikota didampingi pejabat terkait melakukan kegiatan panen padi

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, maka capaian kinerja produksi pertanian tanaman pangan mengalami fluktuasi dimana untuk beberapa komoditi seperti padi, kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan produksi jika dibandingkan dengan jumlah produksi pada tahun 2014. Sedangkan komoditi jagung dan kedelai mengalami peningkatan produksi. Adapun perbandingan jumlah produksi tanaman pangan pada tahun 2015 dengan beberapa tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 31. Capaian Produksi Tanaman Pangan Kota Bima Tahun 2011-2015

No	Komoditi Tanaman Pangan	Produksi (Ton)				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Padi (GKP)	38.012	38.190	36.900	41.879	39.664
2	Jagung (PK)	7.097	7.586	2.466	3.710	8.028
3	Kedelai (BK)	4.766	3.343	1.855	2.129	2.201
4	Kacang Tanah (BK)	608	302	212	319	281
5	Kacang Hijau (BK)	119	13	6	11	11
6	Ubi Kayu (UB)	8.741	1.211	1.374	3.372	2.628
7	Ubi Jalar (UB)	541	57	76	95	79

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima, 2015

Lebih lanjut, capaian kinerja produksi pertanian tanaman pangan tahun 2015 ini apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Kota Bima sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bima 2013 – 2018 dapat dijelaskan melalui tabel berikut.

Tabel 32. Perbandingan capaian kinerja produksi Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2015 dengan Target RPJMD Kota Bima Tahun 2013-2018

No	Komoditi Tanaman Pangan	Tahun 2014 (ton)		Tahun 2015 (ton)		Target 2018 (ton)	Capaian 2015/Target RPJMD 2018 (%)
		Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1	Padi (GKP)	40.590	41.879	44.649	39.664	59.428	66,74
2	Jagung (PK)	2.959	3.710	3.551	8.028	6.136	130,83
3	Kedelai (BK)	2.041	2.129	2.245	2.201	2.987	73,69
4	Kacang tanah (BK)	254	319	305	281	528	53,22
5	Kacang hijau (BK)	7	11	9	11	15	73,33
6	Ubi kayu (UB)	1.649	3.372	1.979	2.628	3.419	76,86
7	Ubi jalar (UB)	84	95	92	79	122	64,75

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima, diolah

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja untuk indicator produksi pertanian tanaman pangan sampai dengan tahun kedua RPJMD telah mencapai lebih dari 50%. Apabila trend positif ini terjadi secara konsisten sampai dengan tiga tahun berikutnya, maka target RPJMD tahun 2018 sangat mungkin dapat tercapai lebih awal atau sebelum tahun 2018. Bahkan sampai dengan tahun 2015 ini untuk komoditi jagung sudah melebihi target RPJMD dengan realisasi sampai dengan tahun 2015 sebesar 130,83%.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya fluktuasi produksi pertanian tanaman pangan pada beberapa komoditi khususnya padi salah satu penyebabnya adalah antara lain :

- 1) terjadinya konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun. Data BPS menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 – 2015 telah terjadi pengurangan luas lahan pertanian.
- 2) produksi pertanian tanaman pangan juga sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca ekstrim seperti kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen para petani di Kota Bima.

- 3) Masih tingginya ketergantungan petani terhadap pupuk anorganik yang menyebabkan terganggunya sifat fisik dan kimiawi tanah yang dapat mengancam kelestarian sumberdaya lahan dan mengancam keberlanjutan proses produksi komoditas pertanian tanaman pangan.

Sedangkan beberapa faktor kunci keberhasilan tercapainya beberapa komponen indikator kinerja produksi pertanian adalah meliputi :

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk menetapkan lahan pertanian berkelanjutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima sehingga lahan pertanian tanaman pangan yang ada di bagian timur Kota Bima ditetapkan sebagai kawasan penyangga yang tidak boleh dialihfungsikan.
- 2) Adanya partisipasi dan komitmen para penyuluh dan tenaga teknis untuk terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani dalam upaya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan.
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi pertanian.

Terkait dengan penggunaan sumber daya, maka sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada telah digunakan secara efisien dan efektif dalam pencapaian indikator kinerja ini. Hal ini dapat diindikasikan dengan tingginya tingkat capaian kinerja yang dilaksanakan selama tahun 2015.

Oleh karena itu, dalam rangka untuk lebih memantapkan lagi upaya pencapaian indikator kinerja produksi pertanian pada tahun-tahun berikutnya, maka pelaksanaan program peningkatan produksi pertanian/perkebunan, program peningkatan kesejahteraan petani maupun program peningkatan penerapan teknologi pertanian dan perkebunan perlu untuk terus dilaksanakan dan ditingkatkan.

13. Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perkotaan yang baik

Pencapaian kinerja sasaran strategis meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik diukur melalui kinerja sejumlah indikator utama sebagaimana berikut.

- a. Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik

Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik pada tahun 2015 ditargetkan 132,82 km dari total panjang jalan kota 204,34 km atau 65 %. Realisasinya adalah sebesar 137,23 km dari 204,34 km atau 67,16 %, sehingga

realisasi yang ada telah melebihi target yang ditetapkan atau capaian kinerja 103,32%. Kondisi tersebut juga menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2014, di mana persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah 60,48%.

Tabel 33. Capaian Kinerja Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik / mantap	132,82 km dari 204,34 km (65%)	137,23 km dari 204,34 km (67,16%)	103,32%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi Kota Bima



Ket. Gambar : Jaringan jalan protokol di Kota Bima

Pencapaian kinerja indikator ini didukung oleh Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan jembatan. Melalui program-program tersebut telah dilaksanakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan yang tersebar di wilayah Kota Bima.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja panjang jalan kota dalam kondisi baik, antara lain :

- Dukungan kebijakan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur khususnya kawasan perkotaan.
- Fungsi Kota Bima sebagai kawasan strategis propinsi.

Pencapaian sasaran strategis peningkatan infrastruktur perkotaan menemui beberapa hambatan/masalah, seperti :

- Kondisi topografi berpengaruh pada penyediaan infrastruktur jalan, di mana pada kawasan yang berbukit, trase jalan lebih panjang karena mengikuti

pola topografi kawasan. Hal ini berdampak pada meningkatnya biaya yang harus disediakan untuk penyediaan infrastruktur jalan tersebut.

- Adanya kelompok-kelompok permukiman yang jauh dari kawasan perkotaan menjadikan tingginya infrastruktur yang harus disediakan untuk menjamin ketersediaan akses ke kawasan tersebut.
- Tumbuhnya kawasan-kawasan permukiman baru menuntut meningkatnya ketersediaan infrastruktur.

Adapun strategi pemecahan terhadap masalah yang dihadapi terkait peningkatan infrastruktur perkotaan ini, antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk terus mendapatkan dukungan dalam pembangunan infrastruktur.
- Melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai prioritas, potensi dan permasalahan per kawasan.

b. Persentase luas permukiman kumuh

Persoalan permukiman merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang fatal dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di



Ket. Gambar : Salah satu sudut kekumuhan di Kota Bima

luar kontrol atau kemampuan pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya. Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah sosial yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin di hampir setiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan.

Masyarakat miskin di perkotaan itu unik dengan berbagai problematika sosialnya sehingga perlu mengupas akar masalah dan merumuskan solusi terbaik bagi kesejahteraan mereka. Dapat dijelaskan bahwa bukanlah kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota namun karena faktor-faktor

ketidakberdayaanlah yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota yang mensejahterahkan.

Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan. Terbentuknya permukiman kumuh, yang sering disebut sebagai *slum area* sering dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan.

Total luas kawasan permukiman di Kota Bima tercatat sebesar 1.775,13 Ha. Dari luas kawasan permukiman tersebut, Pemerintah Kota Bima menargetkan sekitar 3,5% saja yang berada dalam kondisi kumuh. Hingga akhir tahun 2015, realisasi persentase luas permukiman kumuh di Kota Bima mencapai 3,43% dari luas seluruh kawasan permukiman di Kota Bima.

Tabel 34. Capaian Kinerja Persentase Luas Permukiman Kumuh Tahun 2015

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Luas Permukiman Kumuh	3,50 %	3,43 %	102,00 %

Sumber : SKPD terkait

Persentase luas permukiman kumuh tahun 2015 menurun bila dibandingkan dengan persentase luas permukiman kumuh tahun 2014. Pada tahun 2014, data menunjukkan bahwa persentase luas permukiman kumuh di Kota Bima sebesar 3,65% dari luas total permukiman di Kota Bima. Persentase pada tahun 2015 menurun menjadi 3,43% luas permukiman kumuh, atau mengalami penurunan sebesar 0,22%.



Ket. Gambar : Rusunawa di Kota Bima sebagai upaya mengatasi lingkungan kumuh

Dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan permukiman kumuh, telah dilaksanakan Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh serta Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan. Dari program-program

tersebut antara lain telah dilaksanakan pembangunan maupun peningkatan kualitas jalan lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator kinerja, antara lain :

- Mulai tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).
- Adanya kebijakan pemerintah pusat melalui program prakarsa permukiman 100 0 100, yaitu target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak.
- Adanya kebijakan dari baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam mengurangi rumah tidak layak huni antara lain melalui program bantuan stimulant perumahan swadaya dan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni.

Adapun sejumlah hambatan/masalah yang dihadapi, antara lain sebagai berikut :

- Pengelolaan sampah yang belum terpadu.
- Masih adanya masyarakat yang kurang sadar tentang perilaku pola hidup bersih dan sehat.
- Masih adanya permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program untuk sasaran strategis ini antara lain ketersediaan lahan untuk pembangunan sarana dan prasarana peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Pemerintah Kota Bima telah menyusun strategi pemecahan masalah melalui sejumlah langkah-langkah strategis, antara lain :

- Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan pelaksanaan program dan kegiatan antar SKPD sehingga terjadi sinergitas dan menghindari konflik dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.
- Membentuk kelompok-kelompok kemasyarakatan yang turut berperan aktif dalam pengelolaan sampah yang dapat didaur ulang sehingga mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke TPA.
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sanitasi.

- Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mendapatkan program-program yang terkait dengan sanitasi, persampahan, air bersih, perumahan dan permukiman.
- Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat berpola hidup bersih dan sehat lebih baik lagi.

c. Persentase luas kawasan tepian air yang tertata

Konsep kota tepian air (*waterfront city*) merupakan salah satu pendekatan yang diadopsi oleh Pemerintah Kota Bima dalam mendorong pertumbuhan kawasan strategis Kota di sepanjang pesisir Teluk Bima khususnya mulai dari Perbatasan Kota di Niu sampai dengan Kawasan Pelabuhan Laut Bima dengan luas keseluruhan 138,15 hektar. *Waterfrot city* (Kota Tepian) adalah bagian kota yang berbatasan fisik dengan air baik itu tepi pantai, sungai ataupun danau. Sedangkan secara khusus di Kota Bima *waterfront city* Teluk Bima adalah bagian kota yang berbatasan fisik dengan tepi pantai yaitu mulai dari Niu – Lawata sampai Amahami. Penataan dan pembangunan kota tepian air diartikan sebagai suatu proses pembangunan wilayah perkotaan yang secara fisik alamnya berada dekat dengan air dimana bentuk pengembangan pembangunan wajah kota berorientasi ke perairan. Kawasan *waterfront city* biasanya berupa area pelabuhan, perdagangan, pariwisata, permukiman atau industri.

Penataan kawasan kota tepian air Teluk Bima pada tahun 2015 adalah seluas 3,50 hektar. Berupa penataan taman Amahami, taman Lawata, taman Jenamawa, taman median jalan Lawata – Niu serta pembangunan gerbang batas kota di Niu atau terealisasi sebesar 93,37 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2015 yaitu sebesar 3,75 hektar. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2014, maka penataan kawasan kota tepian air Teluk Bima meningkat sebesar 223,65 persen dimana pada tahun 2014 penataan kawasan hanya seluas 1,08 ha.

Tabel 35. Capaian Kinerja Persentase Luas Kawasan Tepian Air yang Tertata Tahun 2015

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Luas Kawasan Tepian Air yang Tertata	2,71 % (3,75 Ha)	2,53 % (3,50 Ha)	93,37 %

Sumber : Bappeda Kota Bima, 2016

Lebih lanjut, capaian kinerja penataan kawasan kota tepian air Teluk Bima sampai dengan tahun 2015 telah mencapai 33,65 hektar atau sebesar 24,36 persen. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah Kota Bima sebagaimana tertuang dalam review RPJMD Kota Bima 2013 – 2018 yang seluas 80 hektar atau 58 persen, maka sampai tahun 2015 ini telah mencapai lebih dari 50 persen dari target sampai dengan tahun 2018.



Ket. Gambar : Desain Arsitektur Kawasan Tepian Air (Waterfront City) Kota Bima

Terdapat beberapa faktor yang menghambat percepatan penataan dan pembangunan kawasan kota tepian air Teluk Bima yaitu antara lain :

- Belum tuntasnya pembahasan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Detail tata Ruang Kecamatan Rasanae Barat di tingkat BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional) sehingga pembahasan raperda pada Badan legislasi belum bisa dilakukan. Hal ini sedikit menghambat investasi pada lahan-lahan privat dikarenakan arahan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi wilayah yang belum ditetapkan dalam bentuk perda RDTR.
- Pertumbuhan ekonomi yang sedikit melambat menyebabkan investasi di bidang infrastruktur perkotaan dan pembangunan kawasan juga berpengaruh.

Sedangkan beberapa faktor kunci keberhasilan capaian kinerja penataan kawasan kota tepian air Teluk Bima adalah antara lain: :

- Adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk menjadikan kawasan kota tepian air Teluk Bima sebagai icon atau landmark Kota Bima.
- Sudah tersedia design arsitektur dan *detail engineering design* (DED) yang memadukan unsur arsitektur modern dengan unsur arsitektur lokal

(budaya *dana mbojo*) sebagai panduan dan pedoman dalam melakukan penataan kawasan kota tepian air Teluk Bima.

Terkait dengan penggunaan sumber daya dan pembiayaan yang dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja, maka sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efisien dan efektif. Oleh karena itu, dalam rangka untuk lebih memantapkan lagi upaya pencapaian indikator kinerja penataan kawasan kota tepian air Teluk Bima pada tahun-tahun berikutnya, maka pelaksanaan program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh, program pembangunan jalan dan jembatan, program perencanaan dan pengendalian tata ruang, program peningkatan sarana dan prasarana pertamanan perlu untuk terus dilaksanakan dan ditingkatkan.

14. Sasaran Strategis Terpeliharanya keamanan dan ketertiban

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis terpeliharanya keamanan dan ketertiban adalah angka kriminalitas.

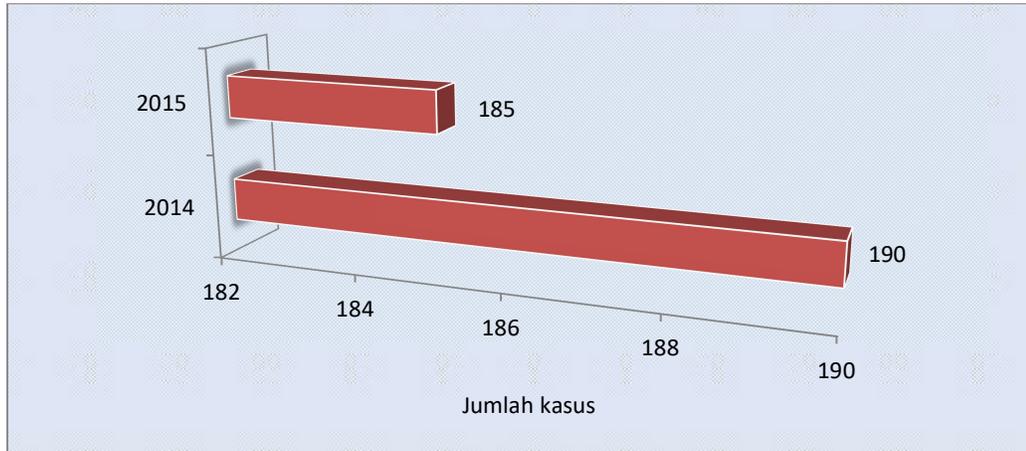
Pada tahun 2015, Pemerintah Kota Bima menargetkan penurunan jumlah



kriminalitas dengan menetapkan indeks kriminalitas sebesar 98,42%. Data menyebutkan bahwa jumlah kriminalitas tahun 2015 sebanyak 185 kasus, dimana jumlah ini menurun dari jumlah kriminalitas tahun 2014 yang tercatat sebanyak 190 kasus. Dengan menggunakan formulasi yang telah ditentukan dalam menghitung indeks kriminalitas, diketahui indeks kriminalitas tahun 2015 sebesar 97,36%. Indeks kriminalitas tahun 2015 bernilai kurang dari 100%, artinya terjadi penurunan jumlah kasus dari tahun sebelumnya, dan dapat dinilai sebagai prestasi kinerja. Artinya, capaian kinerja indeks kriminalitas tahun 2015 sebesar 102,18%.

Tabel 36. Capaian Kinerja Indeks Kriminalitas Kota Bima Tahun 2015

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian
Angka Kriminalitas	98,42%	97,36%	102,18%



Gambar 14. Grafik jumlah kasus kriminalitas di Kota Bima Tahun 2014-2015

Dihat dari jumlah kasus yang terjadi, terjadi penurunan jumlah kasus kriminalitas sebanyak 5 kasus. Hal ini menandakan bahwa capaian kinerja tahun 2015 yang semakin baik.

Beberapa faktor pendukung pencapaian kinerja indikator ini antara lain melalui :

- koordinasi secara intens bersama pengurus forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) dan tim penanganan konflik sosial (PKS)
- koordinasi secara intens dengan forum komunikasi umat beragama (FKUB) dan forum etnis yang ada di kota bima
- kegiatan penyuluhan pendidikan wawasan kebangsaan bagi tenaga pendidik/guru di sekolah-sekolah yang ada di Kota Bima.

Beberapa program pembangunan startegis yang mendukung pencapaian kinerja indikator ini antara lain melalui Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan serta Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.

B. Realisasi Anggaran

1. Pendapatan Daerah

Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dengan menggali potensi sumber pendapatan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Intensifikasi dilakukan antara lain dengan memperkuat basis pajak, sedangkan ekstensifikasi dilakukan antara lain dengan memperluas obyek-obyek pajak dan retribusi daerah.

1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Pada tahun 2016 telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber PAD, Artinya perlu upaya mengoptimalkan peningkatan dan perluasan basis PAD dan mengupayakan secara optimal alokasi dana Perimbangan, agar bagian daerah dapat diperoleh secara proporsional. Untuk itu, ditempuh berbagai upaya seperti peningkatan pengawasan, koordinasi, sinkronisasi data dan informasi untuk kebutuhan perhitungan target PAD, Dana Perimbangan dan lain- lain pendapatan yang sah.

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi PAD

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dilakukan melalui :

- Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah seperti membuat dan merevisi kembali Peraturan Daerah tentang Pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan potensi dan perkembangan daerah.
- Peningkatan kualitas pelayanan dengan menyetarakan tata kelola administrasi . pajak dan retribusi daerah.
- Peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat dan dunia usaha guna memenuhi kewajibannya agar taat dan bangga membayar pajak daerah dan retribusi daerah serta kewajiban lainnya.
- Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan penerimaan daerah seperti melakukan uji petik terhadap objek-objek retribusi daerah.
- Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait, seperti menginventarisasi dan menertibkan objek-objek pajak dan retribusi.
- Optimalisasi kinerja aparat pengelola pendapatan daerah yang akuntabilitas.

- Peningkatan tata kelola administrasi, dan penegakan sanksi bagi masyarakat dan dunia usaha yg tidak taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Intensifikasi dan Ektensifikasi Dana Perimbangan serta Lain-lain Pendapatan yang sah

Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah dilakukan melalui :

- Sinkronisasi data dan informasi untuk kebutuhan perhitungan dan penentuan alokasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, seperti data jumlah PNS, luas wilayah, jumlah penduduk dan data-data pendukung lainnya.
- Memenuhi permintaan data dan laporan tepat waktu dan, tepat sasaran.
- Meningkatkan koordinasi dan konsultasi dalam rangka peningkatan alokasi dana perimbangan yang meliputi DAU, DAK dan DBH.

Dalam rangka optimalisasi upaya dan langkah tersebut diatas, Pemerintah Kota Bima dalam mengelola beberapa jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber PAD yang didasarkan kepada Peraturan Daerah sebagai berikut :

- Pajak Daerah, yang terdiri dari Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Air Tanah; Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- Retribusi Daerah, antara lain :
 - ✓ Retribusi Jasa Umum, seperti : Retribusi Pelayanan Kesehatan; Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Pelayanan Parkir di tepi jalan umum; Pengujian kendaraan bermotor; Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - ✓ Retribusi Jasa Usaha, seperti : Retribusi pemakaian kekayaan daerah; Pasar Grosir dan/atau pertokoan; Retribusi terminal; Retribusi Tempat Khusus Parkir; Retribusi Tempat rekreasi dan Olahraga; retribusi Rumah potong hewan.
 - ✓ Retribusi Perizinan Tertentu, seperti : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); Izin gangguan/keramaian (HO); Izin Trayek; Izin usaha perikanan.

1.2. Target dan Realisasi Pendapatan

Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bima tahun anggaran 2016 ditargetkan sebesar Rp. 726.226.424.153,03 dan berhasil direalisasikan sebesar Rp. 726.226.424.153,03

Komponen pendapatan ini terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah dengan target Rp. 35.067.874.922,00 dan terealisasi sebesar Rp. 30.266.723.056,23 dengan persentase capaian 86,31%;
- Dana Perimbangan dengan target Rp. 558.144.005.546,00 dan terealisasi sebesar Rp. 552.406.937.496,00 dengan persentase capaian 98,97%;
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dengan target sebesar Rp. 133.014.543.685,03 dan terealisasi sebesar Rp. 128.034.578.743,24 dengan persentase capaian 96,26%.

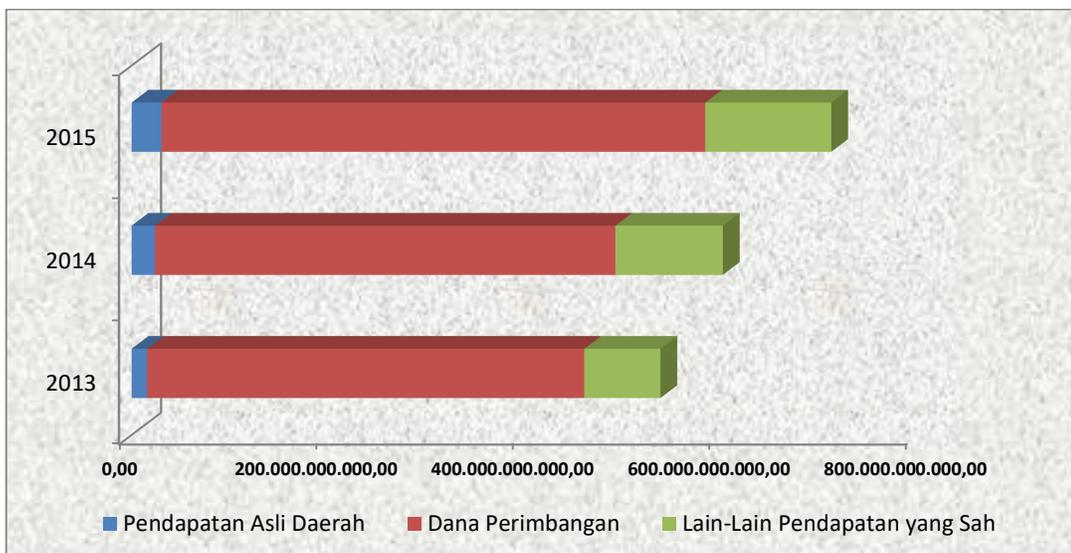
Adapun realisasi anggaran pendapatan Pemerintah Kota Bima Tahun 2016 adalah sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 37. Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Bima Tahun 2016

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PENDAPATAN	726,226,424,153.03	710,708,239,295.47	97.86
1 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	35,067,874,922.00	30,266,723,056.23	86.31
1 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	11,658,800,000.00	11,229,060,740.00	96.31
1 . 1 . 2	Hasil Retribusi Daerah	7,406,715,712.00	5,268,428,827.00	71.13
1 . 1 . 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,921,710,430.00	1,225,903,335.00	63.79
1 . 1 . 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	14,080,648,780.00	12,543,330,154.23	89.08
1 . 2	DANA PERIMBANGAN	558,144,005,546.00	552,406,937,496.00	98.97
1 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	23,989,746,546.00	18,252,678,496.00	76.09
1 . 2 . 2	D-ana Alokasi Umum	435,279,239,000.00	435,279,239,000.00	100.00
1 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus	98,875,020,000.00	98,875,020,000.00	100.00
1 . 3	LAINLAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	133,014,543,685.03	128,034,578,743.24	96.26
1 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	34,611,386,685.03	29,631,421,743.24	85.61
1 . 3 . 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	98,403,157,000.00	98,403,157,000.00	100.00

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bima, 2016

Realisasi Pendapatan daerah Kota Bima dalam kurun 3 tahun terakhir selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013, total realisasi pendapatan daerah adalah sebesar Rp. 537.199.664.525,87. Pada tahun 2014, total realisasi pendapatan daerah Kota Bima meningkat menjadi Rp. 600.579.580.461,59 dan terus meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp. 710.708.239.295,47.



Jika dilihat dari komposisi anggarannya, PAD menyumbang 4,25% dari total pendapatan Kota Bima tahun 2015, sedangkan untuk Dana Perimbangan memberikan kontribusi terbesar, yaitu 77,72% dan sisanya sebesar 18,01% adalah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1.3. Permasalahan Pengelolaan Pendapatan dan Solusinya

Permasalahan yang dihadapi dalam penggalian potensi pendapatan daerah tahun 2016 antara lain :

- a. Masih terbatasnya jumlah dan kemampuan sumber daya aparatur dalam pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Tingkat akurasi data dasar pajak dan retribusi yang berpengaruh terhadap data wajib pajak dan wajib retribusi, perlu diupayakan ketersediaannya guna mendukung peningkatan PAD yang bersumber dari pajak dan retribusi;
- c. Efektifitas penerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan PAD perlu lebih dioptimal guna mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan PAD;
- d. Perlu ditingkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sumber-sumber PAD;
- e. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak/retribusi daerah;
- f. Belum optimalnya kontribusi BUMD terhadap pendapatan daerah;
- g. Masih terjadinya inkonsistensi baik oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi pada pelaksanaan transfer Dana Perimbangan dan dana bagi hasil pajak

dari propinsi, sehingga pagu yang di tuangkan dalam Keputusan Menteri atau Keputusan Gubernur tidak di transfer 100% pada tahun berjalan;

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur yang mengelola pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah;
- b. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan secara intensif dalam rangka meningkatkan kesadaran wajib pajak / wajib retribusi;
- c. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah sampai ke tingkat kecamatan dan kelurahan;
- d. Meningkatkan kontribusi BUMD melalui pengelolaan BUMD secara efisien dan efektif seperti perbaikan manajemen, pembentukan subholding baru dan peningkatan profesionalisme BUMD serta memperkuat permodalan BUMD;
- e. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun pemerintah Provinsi baik secara langsung seperti pada saat perhitungan Lifting dan rekonsiliasi maupun melalui surat;
- f. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat untuk memperoleh Bantuan Dana Kontinjensi/Penyeimbang dan hibah;
- g. Melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dikaitkan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2. Belanja Daerah

Dampak berlakunya otonomi dan desentralisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah adalah semakin luasnya kewenangan pemerintah daerah mengelola dana masyarakat berupa APBD, untuk meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan memajukan perekonomian daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mengelola dana tersebut secara lebih transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel, sehingga akan memberikan manfaat berupa :

- a. Efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
- b. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat
- c. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.

- d. Menghilangkan setiap inefisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah dan melakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.
- e. Mewujudkan pemerintah yang baik dan terbuka terhadap kepentingan masyarakat.

Oleh karenanya, untuk dapat menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabel pengelolaan sumber daya daerah tersebut, maka anggaran daerah sebagai salah satu alat kebijakan pemerintah daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi pembangunan sudah selayaknya diarahkan seoptimal mungkin dengan penerapan konsep efisiensi, efektivitas dan akuntabel dalam pengalokasiannya.

2.1. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Belanja daerah pemerintah Kota Bima pada tahun 2015 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Disamping itu pemerintah Kota Bima sangat menekankan pada penggunaan belanja daerah yang mengedepankan efisiensi dan penghematan serta diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi Anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Bima dalam berbagai kebijakannya selalu memberikan perhatian khusus terhadap program prioritas daerah baik dalam rangka pencapaian visi dan misi pada tahun yang berjalan maupun bagi pencapaian pelayanan publik (good local governance) sebagai perwujudan atas terlaksananya otonomi daerah. Pemerintah Kota Bima memberdayakan seluruh elemen kebijakan yang sudah terimplementasikan pada semua SKPD yang kemudian dijabarkan pada program/kegiatan. Pemerintah Kota Bima tetap menekankan pada penggunaan belanja daerah yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas belanja dengan memanfaatkan sumber pendapatan secara maksimal.

Arah Pengelolaan belanja daerah didasarkan pada pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas

efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi Anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Kebijakan belanja pegawai pada tahun 2016 antara lain sebagai berikut :

- a) Besarnya penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD sebesar 6% (sesuai dengan kebijakan belanja dalam RAPBN tahun 2016);
- b) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD telah diperhitungkan akses yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, serta estimasi alokasi untuk pembayaran gaji ke 13 PNSD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- c) Untuk mengantisipasi kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai tahun anggaran berjalan dan formasi pegawai tahun 2016 serta pengangkatan CPNSD alumni STPDN tahun 2016.
- d) Penyediaan dana untuk membiayai penyelenggaraan jaminan kesehatan (ASKES) bagi PNSD dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
- e) Penganggaran belanja pegawai untuk Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 5% dari target pajak daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f) Penganggaran belanja pegawai untuk pembayaran tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD.

- g) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNSD/CPNSD dalam upaya peningkatan prestasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang didasarkan pada pertimbangan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi.

2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan belanja hibah antara lain :

- a) Penganggaran belanja hibah di alokasikan untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi Pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), perusahaan daerah, dan masyarakat serta organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- b) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah, dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c) Pemberian bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah dirubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Disamping itu, penetapan besaran bantuan tidak melebihi batas toleransi untuk penunjukan langsung sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- d) Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah, telah diupayakan pembatasan terhadap jumlah alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dan format pertanggungjawabannya telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3) Belanja Tidak Terduga

Penetapan anggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah

daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang mendesak, dan tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2016.

Kebijakan Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

- a) Dasar penghitungan besaran honorarium bagi PNSD disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bima, dengan tetap memperhatikan aspek kewajaran dan beban kerja;
- b) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing SKPD, termasuk narasumber/tenaga ahli di luar instansi Pemerintah.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Penganggaran upah tenaga kerja dan tenaga lainnya yang terkait dengan jasa pemeliharaan atau jasa konsultasi baik yang dilakukan secara swakelola maupun dengan pihak ketiga agar dianggarkan pada belanja barang dan jasa;
- b) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2015. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan beban pekerjaan;
- c) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri, agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
- d) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding agar dibatasi frekuensi dan jumlah pesertanya serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel;
- e) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dibatasi;
- f) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan telah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina (Lembaga Administrasi Negara),

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

3) Belanja Modal

- a) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
- b) Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap, tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetap tersebut sampai siap digunakan.

2.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 754.815.387.101,63 dan terealisasi sebesar Rp. 704.320.191.400,37 dengan persentase capaian sebesar 93,31% . Komponen belanja daerah ini terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Belanja Langsung ditargetkan sebesar Rp. 325.892.600.899,00 , mampu direalisasikan sebesar Rp. 313.059.672.865,87 dengan persentase capaian mencapai 96,06%. Adapun Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp. 428.922.786.202,63, terealisasi sebesar Rp. 391.260.518.534,50 dengan persentase capaian sebesar 91,22%. Rekapitulasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima tahun anggaran 2016 tersaji sebagaimana terdapat pada tabel berikut.

Tabel 38. Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima Tahun 2016

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	BELANJA	754,815,387,101.63	704,320,191,400.37	93.31
1 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	428,922,786,202.63	391,260,518,534.50	91.22
1 . 1 . 1	Belanja Pegawai	406,812,974,546.63	370,131,535,433.00	90.98
1 . 1 . 4	Belanja Hibah	16,304,400,000.00	15,571,160,387.50	95.50
1 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	3,983,000,000.00	3,922,941,060.00	98.49
1 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	822,411,656.00	822,411,654.00	100.00
1 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	812,470,000.00	81.25

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.2	BELANJA LANGSUNG	325,892,600,899.00	313,059,672,865.87	96.06
1.2.1	Belanja Pegawai	33,913,928,800.00	32,221,834,373.00	95.01
1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	113,894,435,987.50	105,826,442,264.00	92.92
1.2.3	Belanja Modal	178,084,236,111.50	175,011,396,228.87	98.27

Sumber : Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bima, 2016

Realisasi Belanja daerah Kota Bima dalam kurun 3 tahun terakhir juga selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2013, total realisasi belanja daerah adalah sebesar Rp. 533.340.838.221,00. Pada tahun 2014, total realisasi belanja daerah Kota Bima meningkat menjadi Rp. 600.919.236.597,00 dan terus meningkat menjadi Rp. 704.320.191.400,37 pada tahun 2015.



2.3. Permasalahan Pengelolaan Belanja dan Solusinya

Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan kebijakan Belanja Daerah Kota Bima tahun anggaran 2016, antara lain :

- Perencanaan Anggaran Kas masing-masing SKPD tidak dilakukan secara optimal, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak konsisten sesuai rencana yang dituangkan dalam DPA-SKPD yang mengakibatkan realisasi belanja sebagian besar bertumpuk pada akhir tahun anggaran;

- b. Kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam sistem pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan, serta belum maksimalnya penatausahaan pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah

Adapun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas adalah berikut :

- a. Bagi Dinas/instansi atau SKPD teknis agar membuat perencanaan anggaran KAS yang benar sesuai dengan jadwal dari masing-masing kegiatan yang tercantum dalam DPA-SKPD tersebut.
- b. Perlu dilaksanakan Pendidikan pelatihan serta bimbingan teknis sistem pengelolaan keuangan daerah dan penatausahaan pengelolaan asset daerah.

BAB IV Penutup

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kinerja sebagaimana yang tertuang dalam BAB III, akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kota Bima pada Tahun Anggaran 2016 disimpulkan bahwa capaian sasaran, capaian indikator kinerja, serta akuntabilitas pendapatan dan belanja daerah disimpulkan sebagai berikut.

1. Capaian Sasaran

Pemerintah Kota Bima telah menetapkan 14 sasaran strategis. Dari capaian kinerja masing-masing sasaran strategis, dapat diketahui bahwa rata-rata persentase capaian 14 sasaran tersebut sebesar 107,65%. Persentase capaian terendah adalah Sasaran Strategis ke-4, yaitu meningkatnya mutu pendidikan sebesar 89,67%. Adapun persentase capaian tertinggi dicatatkan oleh Sasaran Strategis ke-1, yaitu meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama sebesar 185,51%.

2. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam penetapan kinerja pada tahun 2016 dikategorikan 88,88% berhasil tercapai, 7,41% cukup berhasil, dan 3,71% tidak berhasil. Rata-rata persentase capaian indikator kinerja adalah sebesar 104,37%, dengan nilai persentase capaian terendah sebesar 0,00% yaitu pada capaian Indikator Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi, dan capaian persentase tertinggi adalah sebesar 260,00% yaitu pada capaian indikator kinerja rata-rata lama proses pelayanan perijinan.

3. Akuntabilitas Pendapatan dan Belanja

Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bima tahun anggaran 2016 berhasil direalisasikan sebesar Rp. 710.708.239.295,47 atau dengan persentase capaian realisasi sebesar 97,86%.

Adapun Belanja Daerah Pemerintah Kota Bima Tahun 2016 ditargetkan sebesar Rp. 754.815.387.101,63 dan terealisasi sebesar Rp. 704.320.191.400,37 dengan persentase capaian sebesar 93,31% . Belanja Langsung ditargetkan sebesar Rp. 325.892.600.899,00 , mampu direalisasikan sebesar Rp. 313.059.672.865,87 dengan persentase capaian mencapai 96,06%. Adapun Belanja Tidak Langsung ditargetkan sebesar Rp. 428.922.786.202,63, terealisasi sebesar Rp. 391.260.518.534,50 dengan persentase capaian sebesar 91,22%.

B. Saran

Guna mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja dan pencapaian target anggaran belanja, maka diperlukan adanya peningkatan kerja sama seluruh pihak yang terkait dalam bentuk :

1. Partisipasi instansi Pemerintah Provinsi NTB di daerah, lembaga kemasyarakatan dan LSM, pihak swasta serta para tokoh masyarakat untuk memberikan informasi yang lengkap, jelas, cepat, tepat dan akurat sehingga pengambilan kebijakan penetapan program dan pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien guna peningkatan administrasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keahlian jajaran Pemerintah Kota Bima dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih nyata.
3. Koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan unit kerja, serta penyesuaian dengan program Pemerintah Kota Bima dalam rangka perencanaan, pengendalian dan pengawasan sebagai bahan perumusan kebijakan Pemerintah Kota Bima yang terkait dengan penyelenggaraan administrasi umum pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.